



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WIRA

Volume 52 / No. 36 / Januari-Februari 2015

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015

PENGERAHAN ALUTSISTA TNI
UNTUK MEMBANTU PENANGANAN BENCANA

BE AWARE OF BIOLOGICAL WEAPON AND ITS POSSIBLE THREAT

CHALLENGES AND DUTIES OF THE WORLD PEACE MISSION
FOR THE INDONESIAN ARMED FORCES

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

Dwi Bahasa



Sumber :Puskompublik Kemhan



Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan edisi pertama WIRA di tahun 2015, yaitu edisi Januari-Februari 2015. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan perubahan kebijakan bidang pertahanan, mulai dari Kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhaneg) sampai dengan visi misi. Seiring dengan hal tersebut, diketengahkan artikel-artikel tentang pengerahan alutsista TNI untuk SAR dan Rakor UO Kemhan disamping rubrik-rubrik opini yang akan memperkaya wawasan pengetahuan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.dmc.kemhan.go.id. Semoga majalah WIRA edisi Januari–Februari 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Editorial

Dear kind readers,

We warmly greet you in the first edition of WIRA in 2015, the January-February 2015 edition. In this edition, the editorial team raises a theme related to the changes in defense policies, including the General Policy on the National Defense (Jakumhaneg) until vision and mission. For that, the editorial team has prepared articles on deployment of the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces for SAR and articles on MoD's Coordinating Meeting. In addition, the opinion rubric will broaden insight of the readers.

All WIRA readers,

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations. For those who want to have WIRA magazine, please contact our editorial team through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.dmc.kemhan.go.id. May you all take advantage of this January-February 2015 edition of WIRA magazine.

Contents

Januari-Februari 2015
Volume 52 / No. 36

KEBIJAKAN PERTAHANAN

- 5** "KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015"
"NATIONAL DEFENSE POLICY 2015"
-

ALUTSISTA

- 11** PENERIMAAN ALUTSISTA TNI UNTUK MEMBANTU PENANGANAN BENCANA
THE DEPLOYMENT OF THE MAIN WEAPONRY SYSTEM IN DISASTERS RELIEF
-

PERTAHANAN

- 18** KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUMASAN (PUBLIC AFFAIRS) KEMHAN/TNI DALAM COHOST PUBLIC AFFAIRS WORKSHOP INDONESIA - CANADA DAN INDONESIAN BASIC PUBLIC AFFAIRS COURSE (IBPAOC)
COOPERATION IN PUBLIC AFFAIRS EDUCATION AND TRAINING OF THE MINISTRY OF DEFENSE/THE INDONESIAN ARMED FORCES IN INDONESIA-CANADA CO-HOST PUBLIC AFFAIRS WORKSHOP AND INDONESIAN BASIC PUBLIC AFFAIRS COURSE (IBPAOC)

- 28** TANTANGAN DAN TUGAS MISI PERDAMAIAAN DUNIA BAGI TNI
CHALLENGES AND DUTIES OF THE WORLD PEACE MISSION FOR THE INDONESIAN ARMED FORCES
-

KEAMANAN

- 40** "MEMPERKOKOH STABILITAS NASIONAL MELALUI PENGUATAN HUBUNGAN POLRI DAN KPK"
"STRENGTHENING NATIONAL STABILITY THROUGH THE STRENGTHENING OF RELATIONS BETWEEN THE INDONESIAN POLICE AND THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION"
-

LITBANGHAN

- 44** FUNGSI LITBANG PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA
THE FUNCTION OF DEFENSE RESEARCH AND DEVELOPMENT TO SUPPORT AUTONOMY IN THE NATIONAL DEFENSE
-

- 59** BERITA FOTO

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasehat: Menteri Pertahanan/Sekjen Kemhan, **Pemimpin Umum:** Kapuskom Publik Kemhan, **Pemimpin Redaksi:** Kolonel Inf Drs. Silvester Albert T, M.A., **Redaksi:** Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos, Letkol Sus Trisatya W, M.IT., Mutiara Silaen, S.Ikom., **Desain Grafis:** Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom., Eko Prasetyo, S.Kom., Imam Rosyadi, **Fotografi:** Bid. BRA, **Percetakan & Sirkulasi:** Nadia Maretti, S.Kom, M.M., **Diterbitkan Oleh:** Puskom Publik Kemhan, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

“KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015”

“NATIONAL DEFENSE POLICY 2015”

Oleh: Tim Redaksi

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2015, adalah masa transisi pemerintahan dari Kabinet Indonesia Bersatu kepada Kabinet Kerja. Banyak kebijakan-kebijakan baru terkait dengan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga. Hal ini tentunya juga akan ber dampak pada kinerja Kementerian Pertahanan.

Dalam merencanakan program kerja dan anggaran pada TA. 2015 diharapkan lebih cermat dan realistik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terkait hal tersebut maka diperlukan kebijakan pertahanan negara yang dirumuskan dari berbagai aspek baik strategi, legislasi, penganggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi



As we all know, 2015 is a transition period for the government from Kabinet Indonesia Bersatu to Kabinet Kerja. There are many new policies related to budget efficiency and spending cuts of the ministries/institutions. This will certainly affect performance of the Ministry of Defense.

The Ministry must then make a more careful and realistic work program and budget for Budget Year 2015 by taking efficiency and effectiveness of the budget use into consideration. In relation to that matter, a national defense policy must be formulated from various aspects, including the strategy, legislation, budgeting, human resources, facilities and infrastructure, and management of the national defense potential.

Taking into consideration the nation's main issues and development challenges as well as achievement of the development, the vision of the national defense development for 2015-2019 is "Realization of sovereign and independent Indonesia with characteristics based on mutual-

KEBIJAKAN PERTAHANAN

dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi pembangunan pertahanan negara untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Adapun upaya untuk mewujudkan Visi tersebut maka dilaksanakan melalui 7 Misi pembangunan pertahanan negara yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

AGENDA PRIORITAS PERTAHANAN NEGARA

Untuk menjamin tetap terselenggaranya pembangunan pertahanan yang sudah dirancang maka dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan 9 (sembilan) prioritas sebagai agenda prioritas pembangunan

cooperation”.

Efforts to realize the vision include 7 missions of the national defense development, including:

1. To materialize national security that is capable of maintaining the region's sovereignty, supporting economic independence by securing the maritime resources that express Indonesia's characteristics as an archipelago.
2. To materialize developed, balanced, and democratic people based on a legal state.
3. To materialize free and active foreign policy and to strengthen the identity as a maritime state.
4. To materialize Indonesian people with high, developed, and prosperous qualities.
5. To materialize a competitive nation.
6. To materialize independent, developed, strong Indonesia as a maritime state based on national interests.
7. To materialize people with characteristics in culture.

PRIORITY AGENDA OF THE NATIONAL DEFENSE

To ensure the designed defense development, it is implemented based on a priority scale. To show the priority in the changes towards politically-sovereign, economically-independent Indonesia with characteristics in culture, nine priorities have been formulated as an agenda of the national defense development, as follow:

1. To cause the state to be present to protect the whole nation and to provide a sense of security to all the people.
2. To cause the government to be present at all time by setting up clean, effective,

KEBIJAKAN PERTAHANAN

pertahanan negara kedepan sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu pada program Kabinet Kerja maka Kementerian Pertahanan juga memiliki tujuan strategis di dalam pertahanan negara, adapun agenda prioritas tujuan strategis Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, sebagai berikut: terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara, terselenggaranya pertahanan negara yang mampu ikut serta

democratic, and trustworthy governance.

3. To build Indonesia by strengthening the regions and villages in the frame of a unitary state.
4. To strengthen the state's presence in reforming corruption-free, dignified and trustworthy system and law enforcement.
5. To increase the quality of life of the Indonesian people.
6. To increase the people's productivity and competitiveness in the international market so that the Indonesian people can rise up with the other Asian nations.
7. To materialize economic independence by moving the domestic economic strategic sectors.
8. To conduct a revolution in the nation's characters.
9. To strengthen Indonesia's unity and social restoration.

With reference to the Kabinet Kerja's programs, the Ministry of Defense also has strategic goals in the national defense. The agenda of the government's strategic priority goals include: the organization of the national defense that is capable of facing threats, the organization of the national defense that is capable of handling the sea, land, and air security, the organization of the national defense that is capable of participating in the realization of the world peace, the availability of a strong, independent, and competitive defense industry, Indonesian citizens who are aware of the National defense.

In the Strategic Plan 2015-2019, the Ministry of Defense manages the defense components more comprehensively. It means that not only the main components - in this case the Indonesian Armed Forces and the defense industry - but also the other defense sub systems must be prepared.

KEBIJAKAN PERTAHANAN

mewujudkan perdamaian dunia tersedianya industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing dan terwujudnya Warga Negara Indonesia yang memiliki kesadaran Bela Negara.

Kementerian Pertahanan pada program Rencana Strategis 2015-2019 pengelolaan komponen pertahanan dilakukan secara lebih komprehensif. Artinya tidak hanya komponen utama dalam hal ini TNI dan industri pertahanan saja namun juga harus melakukan penyiapan pada sub-sub sistem pertahanan lainnya.

Sasaran kebijakan pertahanan negara tahun

Targets of the national defense policy 2015 are mentioned in the Decree of the Minister of Defense No. 1446/2014. The targets include: to continue development of MEF of the Indonesian Armed Forces, to materialize development of the defense industry/technology mastering by ToT, and to implement international cooperation.

Other targets include sending troops and facilities according to the UN's need and request, discussing the drafts on the defense sectors, particularly the draft on National Security, the draft on the State's Confidentiality, and the draft on the Indonesian Armed Forces, as well as



Sumber: Puskompublik Kemhan

2015 tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 1446 Tahun 2014. Sasaran tersebut adalah; melanjutkan pembangunan MEF TNI, terwujudnya pengembangan Industri pertahanan/penguasaan teknologi melalui ToT, serta terlaksananya kerjasama internasional.

Sasaran lainnya adalah terpenuhinya pengiriman pasukan dan sarpras sesuai kebutuhan dan permintaan PBB, terselenggaranya pembahasan RUU Bidang pertahanan terutama RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara, RUU TNI serta per-UU-an lainnya. Terselenggaranya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk pengamanan wilayah perbatasan darat melalui konsep sabuk pengamanan dan peningkatan pengamanan pulau-pulau kecil terluar.

Sasaran selanjutnya adalah terselenggaranya penggerahan kekuatan laut dan udara dalam upaya pengamanan maritim dan dirgantara di wilayah yurisdiksi nasional, terwujudnya kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan dengan Litbang Perguruan Tinggi, Litbang industri pertahanan dalam rangka kemandirian Industri pertahanan, terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, bersih, dan akuntabel, serta terwujudnya penguatan intelijen melalui Sisfohanneg berbasis cyber dan SDM.

Sasaran pada bidang Sumber Daya Manusia adalah terwujudnya pembinaan karier bagi prajurit dan PNS Kemhan/TNI, terwujudnya kekuatan pertahanan negara melalui penataan kelembagaan yang bersifat trimatra terpadu dan peningkatan sinergitas. terwujudnya kemampuan negara yang handal dalam menghadapi wabah penyakit, bencana alam, perompakan, pencurian, pelanggaran perbatasan, perang cyber dan spionase.

Sasaran dalam rangka penanaman kesadaran bela negara adalah terlaksananya pembinaan karakter bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam bela negara,

the draft on the empowerment of the defense regions to secure the land borders through the concept of security belts and increased security of the outer-most small islands.

The next targets include deployment of the sea and air power to secure the sea and sky in the national jurisdiction, materialization of cooperation in defense research and development with some universities' research and development department, materialization of research and development in the defense industry in the frame of independence in the defense industry, organization of effective, clean and accountable budget governance, and strengthening of intelligence through cyber and human resources-based system of the National Defense System Information (Sisfohanneg).

The target in human resources is materialization of career development of soldiers and government employees of the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces, materialization of the national defense strength through integrated trimatra institution and synergy increase, materialization of the reliable capability of the state in facing epidemics, natural disasters, piracies, thefts, border violations, cyber wars and espionage.

The target in the frame of instilling the awareness of the national defense is implementation of the nation's characters development and understanding in the national defense, the design of the national resources empowerment in the reserve and supporting components, the main and other components in the national defense system.

With the formulation and stipulation of the national defense policy 2015, the Ministry of Defense will immediately formulate the strategy targets that must be materialized in its respective programs and activities.

Active participation of all employees of the Ministry of Defense is highly expected to further enhance the Ministry's performance. The future

KEBIJAKAN PERTAHANAN



Sumber: Puskompublik Kemhan

tersedianya rancangan konsep pemberdayaan sumber daya nasional dalam komponen cadangan, komponen pendukung, unsur utama dan unsur lain sistem pertahanan negara.

Dengan telah dirumuskan dan ditetapkannya kebijakan pertahanan tahun 2015 seluruh jajaran Kemhan segera merumuskan sasaran strategi yang harus diwujudkan dalam program dan kegiatan masing-masing.

Peran serta aktif seluruh warga Kemhan sangat diharapkan sehingga kinerja Kemhan semakin meningkat. Tantangan tugas kedepan semakin kompleks dan dinamis sehingga membutuhkan profesionalisme dan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan baik.***

challenges are increasingly complicated and dynamic that high professionalism and discipline are required to implement and finish the tasks well.***

PENGERAHAN ALUTSISTA TNI UNTUK MEMBANTU PENANGANAN BENCANA

THE DEPLOYMENT OF THE TNI's MAIN WEAPONRY SYSTEM IN DISASTERS RELIEF

Oleh: Tim Redaksi



Sumber: Puskompublik Kemhan

Pada tanggal 28 Desember di saat masyarakat Indonesia menantikan datangnya pergantian tahun, Pesawat Air Bus A-320 route Surabaya-Singapura dengan nomor penerbangan QZ 8501 milik maskapai penerbangan Air Asia dinyatakan hilang kontak dan jatuh di selat Karimata. Kejadian tersebut sotak membuat semua instansi terkait bertindak cepat, terutama Basarnas. Dibantu tim dari berbagai negara mereka bahu-membahu melakukan pencarian dan evakuasi korban. TNI dijadikan sebagai tulang punggung Basarnas

On December 28th, 2014, when the Indonesian people were waiting for the new year eve, an Airbus A320 flight number QZ 8501 of Air Asia flying Surabaya – Singapore, was stated to lose contact and crashed in Karimata strait. All related institutions, especially the National SAR Body (Basarnas), took immediate actions. Assisted by teams from a number of countries, they worked together to search and rescue the victims. Basarnas relied on the Indonesian Armed Forces, which then deployed the main



Sumber: <https://www.todayonline.com>

dengan mengerahkan semua Alutsista guna mendukung operasi tersebut. Hasilnya luar biasa, dalam waktu singkat lokasi jatuhnya pesawat ditemukan dan berlanjut evakuasi korban. Tapi ada kelompok masyarakat yang bertanya, apakah perlu mengerahkan Alutsista TNI untuk menangani tragedi tersebut? Mungkin mereka berpikir begitu mengingat besaran biaya yang harus dikeluarkan dan pengaruh terhadap usia pakai peralatan itu sendiri.

Dalam data yang dipublikasikan Basarnas pada 31 Desember 2014 lalu, mereka mengerahkan 17 unit helikopter, 9 unit pesawat dan 42 unit kapal untuk mencari korban. Bila ditambah dengan armada asing, jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Biaya operasional per unit armada, tidaklah murah. Sebagai gambaran, KRI Banda Aceh membutuhkan sedikitnya 300 kiloliter solar untuk bisa beroperasi. Harga solar sekarang Rp 6.500 per liter, artinya biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 2,2 miliar. Itu baru untuk bahan bakar, tidak termasuk operasional kru dan peralatan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga

weaponry system to support the operation. The result was extraordinary. In a short period of time, the location of the crash was found and the victims were evacuated. However, some groups of people were questioning, was there a need to deploy the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces to handle the tragedy? They might think so considering the large amount of money that was spent and the impact to the equipment lifetime.

In the data published by Basarnas on December 31st, 2014, they deployed 17 units of helicopters, 9 units of airplanes and 42 units of boats to search the victims. Added by the foreign armada, the number was much higher. The operational cost per unit of the armada was high. For an illustration, KRI Banda Aceh needed at least 300 kiloliters of solar to operate. Solar costs IDR6,500/liter, meaning that the solar cost totaled IDR2.2 billion. That is just the fuel, excluding the crew and the equipment. Commander of the Indonesian Armed Forces, General Moeldoko, also gave a picture on



Sumber: <https://www.mediaviva.co.id>

memberikan gambaran soal biaya perjalanan kapal. Menurut dia, satu unit kapal perang kelas frigate dengan panjang sekitar 100 meter butuh bahan bakar solar Rp 900 juta untuk berlayar sehari penuh. Biaya solar semakin membengkak bila wilayah patroli kapal luas. Jika dikalikan dengan 42 kapal, maka jumlahnya sekitar Rp 40 miliar per hari. Itu bukanlah suatu biaya yang sedikit untuk sebuah operasi TNI.

Tentu ada dasar yang kuat yang melandasi tindakan TNI tersebut, lebih dari sekedar rasa kemanusiaan. Apakah dasar hukum yang melandasi tindakan tersebut?

Seketika setelah Presiden mengetahui kejadian tersebut, kemudian mengeluarkan Instruksi untuk mengerahkan segala kemampuan dan tidak ada batasan waktu untuk penanganan kejadian. Tetapi selain karena Instruksi Presiden tersebut setidaknya ada lima alasan penting lain yang mendasari yaitu:

Pertama, TNI memiliki payung hukum berupa UU No 34 tahun 2004 yaitu salah

the ship voyage. According to him, one unit of 100-meter long frigate needed IDR900 million for fuel for a whole-day voyage. The wider the patrol area, the higher the solar cost. Multiplied by 42 boats, the total cost was IDR40 billion per day. That was a cost for an operation of the Indonesian Armed Forces.

There must have been a strong basis for the Indonesian Armed Forces to take such actions, more than just humanitarian. What was the legal basis for the actions?

Once the President got informed of the incident, he instructed related institutions to deploy all capabilities without any limit of time to handle the disaster. Apart from the President's instruction, there were at least five important reasons that were basis of the operation, including:

First, the Indonesian Armed Forces have a legal umbrella, that is Law No. 34/2004 stating that one of the military operations apart from war, shall be to help handle natural disasters,



Sumber:<http://harianterbit.com>

satu bentuk tugas operasi militer selain perang membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).

Kedua, TNI memiliki *system* kelembagaan yang kuat dengan kultur organisasi yang mengutamakan kesiapsiagaan dan peningkatan *skill* individual dan tim. Hal ini memungkinkan TNI bergerak dan bertindak lebih cepat, efisien, dan terkoordinir dengan baik dibandingkan lembaga non militer.

Ketiga, TNI memiliki tentara atau personil yang siap dan unggul dalam fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-tugas darurat, baik secara individual maupun kelompok, sehingga cocok untuk respon darurat ketika bencana terjadi.

Keempat, TNI memiliki sistem reparasi dan pemeliharaan peralatan yang baik, sehingga dalam kondisi minimum secara material

evacuation, and humanitarian aid as well as search and rescue.

Second, the Indonesian Armed Forces have a strong bureaucracy system with an organizational culture that prioritizes readiness and increase of the individual and team's skill. It may enable the Indonesian Armed Forces to take rapid, efficient and coordinated moves and actions compared to non-military institutions.

Third, the Indonesian Armed Forces have both physically and mentally-ready and excellent soldiers or personnel to face emergency duties, both individually as well as in groups, so that they are suitable for emergency response in disasters.

Four, the Indonesian Armed Forces have a good system of equipment repair and maintenance, so that even in a materially minimum condition, the available human resources can be optimized to prevent disasters.

Five, the Indonesian Armed Forces have

sekalipun, sumberdaya fisik yang tersedia mampu dioptimalkan dengan baik untuk tujuan-tujuan penanggulangan bencana.

Kelima, TNI memiliki perlengkapan yang sesuai untuk tugas-tugas kedaruratan baik dari segi sarana maupun prasarana. Kelima alasan ini memberikan legitimasi TNI untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kegiatan SAR.

Itulah dasar kuat yang menjadi pedoman bagi TNI dalam mengerahkan Alutsista mereka. Sedangkan mengenai hal lain seperti besarnya biaya, dan usia pakai peralatan tentu semua akan setuju untuk menempatkan nyawa di atas segalanya. Dengan perawatan yang baik dan jaminan ketersediaan suku cadang masalah usia pakai peralatan bukan lagi masalah. Perlu dipahami bahwa Penanggulangan Bencana memiliki tiga fase yaitu: pra-bencana, bencana, dan pasca-bencana. Sementara TNI dapat

suitable equipment for emergency duties in terms of both facilities and infrastructure. These five reasons legitimate the Indonesian Armed Forces to carry out disasters prevention and SAR duties.

That's the strong basis that has become guidance for the Indonesian Armed Forces to deploy the main weaponry system. Other issues such as the high cost and the equipment lifetime, everyone will definitely agree that human lives must be placed above all. With good maintenance and a guarantee of the spare parts availability, the equipment lifetime is no longer an issue. We must understand that disasters prevention has three phases: pre-disasters, disasters, and post-disasters. The Indonesian Armed Forces can move in all phases. In the post-disasters phase, the Indonesian Armed Forces play a more important role due to the emergency, instant, and unpredictable characters of disasters During



Sumber:<http://www.kabar65.com>

bergerak pada semua tahapan. Dalam tahapan pasca bencana ini, TNI lebih berperan karena bersifat darurat, seketika, dan sering kali tanpa diprediksi sebelumnya. Pada masa tanggap darurat, TNI dapat berperan pada kegiatan yang disesuaikan kebutuhan dalam konteks penanganan suatu bencana. Kegiatan ini dapat terjadi beriringan ataupun bertahap, tergantung pula pada situasi yang terjadi di lapangan.

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Bangsa Indonesia tentu sudah menyadari bahwa mereka tinggal di wilayah yang memiliki intensitas bencana yang tinggi. Bencana yang kerap terjadi di Indonesia dengan kadar dan efek merusaknya yang beragam, mendorong perlunya dibangun sebuah manajemen penanggulangan bencana yang komprehensif, yaitu sebuah skema manajemen penanggulangan bencana yang selain menjadi pedoman, akan sekaligus berperan untuk memperkecil korban dan efek kerusakan yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Melihat dari deretan bencana yang sudah terjadi, baik yang dapat dideteksi maupun tidak maka boleh disebut sebagai “*turbulence*” yang menyadarkan semuanya yang terkait penanganan bencana, menyadarkan perlunya bencana. Mengacu *Mind of the Strategist* yang ditulis pada 1983, bahwa bencana dapat sebagai variabel ke *change driver* atau pemandu perubahan. dengan adanya sebuah realitas yang ada berubah, yang lantas perspektif dan sejumlah manajemen lainnya.

Dengan konstruksi maka penanganan boleh bersifat reaktif. sosok atau model

the emergency response, the Indonesian Armed Forces can play a role in activities adjusted to the needs in the context of handling disasters. The activities can take place simultaneously or gradually, depending on the situation in the field.

DISASTERS PREVENTION MANAGEMENT

The Indonesian people must be already aware that they live in area with high intensity of disasters. Frequent disasters in Indonesia with various levels and damaging impacts encourage the establishment of a comprehensive disasters prevention management. It's a disasters prevention management scheme that provides guidance to minimize the victims and damages caused by the disasters. Considering the series of disasters that have happened, both detected and not detected, they can be said turbulence that makes us aware of the need to prevent disasters and to make a disaster mapping. With reference to the book “The Mind of the Strategist” of Ohmae written in 1983, disasters can be categorized as the fourth variable, that is a change driver. At least, with a disaster, a reality spontaneously changes, which further changes the perspective and a number of other



Sumber:<http://indohub.com>

bencana harus berada dalam “*setting profile*” profesional terukur, mengingat di dalamnya terdapat aspek keselamatan manusia. Christiana (2005) yang mengutip Kirschenbaum dalam bukunya *Chaos Organization and Disaster Management* (2004) menyatakan bahwa pengukuran keefektifan terhadap manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan mengukur kinerja aktual dari pemenuhan tujuan manajemen penanggulangan bencana yang diarahkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian material.

Dengan demikian, menurut Christiana, keefektifan manajemen penanggulangan bencana dapat dilihat dari tersedia atau tidaknya (ketersediaan) upaya-upaya preventif yang bersifat memberdayakan warga untuk melindungi diri dan mencegah kerugian materiil. Chrstiana menjelaskan secara nyata indikator keefektifan dapat dilihat dari tersedia atau tidaknya panduan dan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berbagai “*stakeholder*” untuk paham akan bencana dan selalu siap dalam menanggulangi bencana dalam rangka mencegah dampak bencana yang bersifat negatif.***



Sumber:<http://kaskus.co.id>

management steps.

Having such a construction, disaster handling may not be reactive. On the contrary, it must be professional and measurable, as the aspect of human safety is included. Christiana (2005), who quoted Kirschenbaum, in her book “Chaos Organization and Disasters Management” (2004), has stated that effectiveness in the disasters prevention management can be measured by the actual performance to fulfill its purpose, which is to prevent victims and material loss. Thus, according to Christiana, the disasters prevention management effectiveness can be seen from the availability or unavailability of preventive efforts to protect the people and prevent material loss.

Christiana has explained that effectiveness indicators can be seen from the availability of knowledge and awareness of various stakeholders to understand disasters and to be always ready in disasters prevention to prevent negative impacts of the disasters.***

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUMASAN (PUBLIC AFFAIRS) KEMHAN/TNI DALAM COHOST PUBLIC AFFAIRS WORKSHOP INDONESIA - CANADA DAN INDONESIAN BASIC PUBLIC AFFAIRS COURSE (IBPAOC)

COOPERATION IN PUBLIC AFFAIRS EDUCATION AND TRAINING OF THE MINISTRY OF DEFENSE/THE INDONESIAN ARMED FORCES IN INDONESIA-CANADA CO-HOST PUBLIC AFFAIRS WORKSHOP AND INDONESIAN BASIC PUBLIC AFFAIRS COURSE (IBPAOC)

Oleh: Lettu Laut (KH) Wahyu Widadi

Program kerja sama pendidikan kehumasan Kemhan dan TNI diwali dari penawaran kerja sama lokakarya *Public Affairs* (PA) dari Atase Pertahanan Kanada untuk RI di Jakarta, Colonel Michel Latouche kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan pada awal tahun 2012. Karena materinya berkaitan dengan bidang kehumasan maka Dirkersin membicarakan tawaran tersebut dengan Kapuskom Publik Kemhan. Penawaran kerja sama ini disambut positif oleh Kapuskom Publik Kemhan, selanjutnya diadakan pertemuan antara Kapuskom Publik Kemhan, Mayjen TNI Hartind Asrin dengan Athan Kanada untuk Indonesia, Colonel Michel Latouche di Jakarta pada bulan Juli 2012. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati untuk diadakan *CoHost Public Affairs Workshop* di Jakarta pada bulan November 2012 selama 8 hari dan sebelum pelaksanaan diadakan kunjungan kerja dan lokakarya *Public Affairs* di DPALC (*Defense Public Affairs Learning Center*), Ottawa – Kanada oleh pimpinan lembaga kehumasan Kemhan dan TNI yaitu Kapuskom Publik, Kapuspen TNI, Kadispenad, Kadispenal, dan Kadispenau. Kunjungan dan lokakarya *Public Affairs* para pejabat lembaga kehumasan Kemhan dan TNI tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 September 2012.

Sebagai kelanjutan kegiatan PA *Workshop* dan kursus dasar perwira kehumasan Kemhan dan TNI (*Indonesian Basic Public Affairs Officer Course* (IBPAOC)) bersama Kanada maka

Cooperation in public affairs education between the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces started with a cooperation proposal of a public affairs workshop from the Canadian Defense Attaché for Indonesia in Jakarta, Colonel Michel Latouche, in 2012 to the Directorate of International Cooperation of the Directorate General of Defense Strategy of the Ministry of Defense. The proposal was positively welcomed by the Centre of Public Communication of the Ministry of Defense following a meeting between Head of the Centre of Public Communication of the Ministry of Defense, Major General Hartind Asrin, with the Canadian Defense Attaché for Indonesia in Jakarta in July 2012. Both sides agreed to hold an 8-day co-host public affairs workshop in Jakarta in November 2012. Prior to the workshop, the Defense Public Affairs Learning Centre of Ottawa – Canada made a work visit and workshop for management of the public affairs institutions of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, including head of the Centre of Public Communication, Head of the Information Centre of the Indonesian Armed Forces, Head of the Army Information Centre, Head of the Navy Information Centre, and Head of the Air Force Information Centre. The visit and public affairs workshop for officials of the public affairs institutions of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces were held on September 3rd – 8th, 2012.



Sumber: Puskom Publik Kemhan

kegiatan penyelenggaraan tahun 2014 di selenggarakan di Badiklat Kemhan. Kerjasama kursus ini merupakan tawaran kerja sama dari DMTC (*Department Military Training Cooperation*) Kanada untuk membantu pengembangan kapasitas profesionalisme *Public Affairs* Kemhan dan TNI khususnya komunitas penerangan. Sesuai rencana kerja sama pelatihan IBPAOC diselenggarakan dalam tiga tahap selama tiga tahun, untuk tahap pertama (2014) telah dilaksanakan dengan sepenuhnya tenaga instruktur dari Kanada (DPALC) dengan bantuan satu orang instruktur Kemhan/TNI. Pada tahap kedua (2015) akan diselenggarakan dengan dukungan instruktur Kanada (DPALC) dan sebagian dari Kemhan/TNI. Sedangkan pada tahap ketiga atau tahun (2016) akan sepenuhnya diselenggarakan dengan instruktur Kemhan/TNI. Diharapkan pada tahap ketiga ini materi kurikulum Diklat

As a follow up to the public affairs workshop in 2012, an Indonesian Basic Public Affairs Officer Course (IBPAOC) of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces in cooperation with Canada was held in 2014 at the Education and Training Centre of the Ministry of Defense. The cooperation was proposed by the Canadian Department of Military Training Cooperation (DMTC) to help develop professionalism of Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces Public Affairs, the information community in particular. According to the plan, the IBPAOC will be held for three years; in the first phase (2014), the education and training were held with Canadian instructors (DPALC) assisted by an instructor from the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces. In the second phase (2015), the education and training will be jointly held by both instructors of Canada (DPALC) and

yang dirancang sudah menggunakan Bahasa Indonesia sehingga memudahkan pemahaman bagi seluruh peserta.

Public Affairs Workshop

Public Affairs Workshop dilaksanakan selama delapan hari, mulai dari 20 Oktober 2014 s.d. 29 Oktober 2014. Kegiatan ini berisi tentang pengetahuan umum mengenai *public affairs* yang diberikan secara singkat disertai dengan diskusi dan latihan-latihan yang dikerjakan secara berkelompok. Secara umum dapat dijelaskan secara singkat tentang *public affairs workshop*. PA Workshop 2014 ini didukung oleh staf pengajar dari Kanada, Indonesia dan Brazil antara lain; Captain Holly Anne Brown, *Course Director*; Captain Jean Francois Lambert, *Deputy of Course Director*, Lieutenant Rodrigo Streb, Lettu Laut (KH) Wahyu Widadi dan Master Corporal Pier-Adam Turcotte. Peserta PA workshop diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari perwira TNI serta PNS golongan tiga dari Indonesia dan beberapa peserta dari negara asia lainnya. Seluruh penyampaian materi *workshop* menggunakan

the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces. In the final phase (2016), the education and training will be entirely held by instructors of the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces. It is hoped that in the third phase, the education and training curriculum will entirely use Bahasa Indonesia.

Public Affairs Workshop

The public affairs workshop was held for eight days, from October 20th, 2014 to October 29th, 2014. It was general knowledge on public affairs in brief, accompanied by discussions and group exercises.

In general, following is a brief explanation on the public affairs workshop. The PA Workshop 2014 was supported by instructors from Canada, Indonesia and Brazil, including Captain Holly Anne Brown, Course Director; Captain Jean Francois Lambert, Deputy of Course Director, Lieutenant Rodrigo Streb, Lettu Laut (KH) Wahyu Widadi and Master Corporal Pier-Adam Turcotte. Some 32 participants took part in the workshop, consisting of the Indonesian Armed



Sumber: Puskom Publik Kemhan

- Compet on this? facts to
- Authori it?



Sumber: Puskom Publik Kemhan

Bahasa Inggris. Materi pelajaran yang diberikan kepada kami pada *Public Affairs Workshop*, sebagai berikut: *Basic communication theory*, *Key messages*, *Internal communication*, *Decision brief*, *Social media reality* dan *Scrum theory*.

IBPAOC

Kegiatan Diklat/ Kursus Dasar Perwira Kehumasan Kemhan dan TNI, *Indonesian Basic PAO Course (IBPAOC)* dilaksanakan selama empat minggu, dimulai pada 3 November s.d. 28 November 2014. Diklat ini dirancang oleh DPALC untuk memberikan pengetahuan dasar bidang *public affairs* pada perwira TNI ataupun PNS setingkat perwira yang berdinas di bidang *public affairs* (penerangan). Diklat ini merupakan tahap pertama dan masih banyak mengadaptasi materi BPAOC dari Kanada dimana hampir seluruh staf dan instrukturnya dari Kanada, maka masih menggunakan standar dari Kanada. Adapun materi Diklat ini banyak mengambil materi dari BPAOC Kanada, yang dikembangkan dan diadaptasikan ke sistem kerja Kemhan dan TNI. Karena kegiatan ini berupa diklat, maka juga diadakan penilaian melalui ujian untuk menentukan kelulusan siswa.

Forces officers, government officials of officer level, and officers from other Asian countries. The subjects were all taught in English, consisting of: Basic communication theory, Key messages, Internal communication, Decision brief, Social media reality, Scrum theory

IBPAOC

The Indonesian Basic Public Affairs Officer Course (IBPAOC) was held for four weeks, from November 3rd, 2014 until November 28th, 2014. The education and training activity was designed by DPALC with the aim of providing basic knowledge of public affairs to the Indonesian Armed Forces officers and government officials of officer level in charge of public affairs. The program took subjects from Canadian BPAOC, which had been adapted to the work culture of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces. As it was education and training, an assessment through exams was required to determine whether the students pass or fail. On the other hand, as it was the first program which adapted many subjects from Canada, and almost all the staff and instructors were also from Canada, it used Canadian-adapted standard.

In general, the learning activity was more



Sumber: Puskom Publik Kemhan

Secara umum kegiatan belajar-mengajar lebih intensif dengan banyaknya penugasan yang diberikan. Diklat IBPAOC didukung oleh staf pengajar dari Kanada dan Indonesia antara lain; Major Allison Delaney, *Course Director*; Captain Vincent Bouchard, *Deputy Course Director*; Mayor Inf. Barnes Mahardika; Captain Indira Thackorie; Lettu Laut (KH) Wahyu Widadi. Peserta IBPAOC diikuti 31 siswa yang terdiri dari perwira TNI serta PNS setingkat perwira dari Indonesia dan perwira dari negara asia lainnya. Penentuan kelulusan dilakukan dengan melaksanakan ujian yang terdiri dari tiga materi yaitu membuat *draft* dan melaksanakan *decision brief*, membuat *news release* dan melaksanakan media *interview*.

Pada pelaksanaan ujian ketiga materi tersebut, beberapa siswa harus mengulang (*remedial*) untuk lulus diklat dengan berbagai pertimbangan seperti penyampaian materi pelajaran semua menggunakan Bahasa Inggris.

Materi pelajaran yang diberikan kepada

intensive with the many assignments given. The IBPAOC was supported by Canadian and Indonesian instructors, including Major Allison Delaney, *Course Director*; Captain Vincent Bouchard, *Deputy Course Director*; Mayor Inf. Barnes Mahardika; Captain Indira Thackorie; Lettu Laut (KH) Wahyu Widadi. Some 31 participants, consisting of the Indonesian Armed Forces officers and government officials of officer level as well as officers from other Asian countries, took part in the program. The participants were determined to pass or fail through exams consisting of: To make a draft and implement a decision brief; To make a press release; To conduct a media interview.

In the implementation of the three exams, some participants failed and were given a chance for a remedial. If they failed again in the remedial, they wouldn't pass the education and training program. Eventually, all the participants who had the remedial, passed with some considerations. The subjects were taught in English.

kami untuk diajarkan di IBPAOC.

- a. *Indonesian law and policy regarding public affairs*
- b. *Describe Indonesian and international media landscape*
- c. *Writing Hometowner*
- d. *Understand internal communication*
- e. *Theory and techniques of internal communication*
- f. *Internal communication tools and products*
- g. *Describe photography knowledge in public affairs*
- h. *Describe audio knowledge in public affairs*
- i. *Describe videography knowledge in public affairs*
- j. *Citizen journalism*
- k. *Understand social media*
- l. *Social media concept and strategies*
- m. *Social media in military*

Secara umum hambatan pada pelaksanaan workshop maupun IBPAOC adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya peserta yang tingkat pemahaman Bahasa Inggrisnya lemah bahkan sama sekali tidak menguasai. Walaupun sudah disebutkan dalam persyaratan peserta sudah disebutkan dengan jelas bahwa untuk kegiatan ini peserta harus memahami Bahasa Inggris. Hal ini bukan hanya terjadi pada peserta dari Indonesia, namun juga dari negara lain.
- b. Peserta bekerja bukan pada bidang kehumasan atau *public affairs*. Untuk

The subjects taught in IBPAOC included:

- a. The Indonesian law and policy regarding public affairs
- b. Describing Indonesian and international media landscape
- c. Writing Hometowner
- d. Understanding internal communication
- e. Theory and techniques of internal communication
- f. Internal communication tools and products
- g. Describing photography knowledge in public affairs
- h. Describing audio knowledge in public affairs



Sumber: Puskom Publik Kemhan



Sumber: Puskom Publik Kemhan

kegiatan *workshop*, hal ini tidak begitu menimbulkan masalah, namun untuk IBPAOC hal ini sangat menyulitkan. Karena materi IBPAOC dirancang untuk perwira yang bekerja di bidang *public affairs* sehingga minimal mengerti tentang prosedur kerja *public affairs*. Kesulitan yang ditemui adalah mereka kesulitan memahami cara kerja *public affairs*, sehingga waktu banyak terbuang untuk menyamakan persepsi peserta.

- c. Pada IBPAOC, banyak penugasan dan latihan diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana para siswa mengerti materi pelajaran yang diberikan. Bagi para siswa yang tidak bekerja di bidang penerangan, mereka tidak mengerti bagaimana harus mengerjakan tugas-tugas tersebut, sehingga di minggu pertama banyak dari mereka yang tidak mengerjakan tugas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain:

- i. Describing videography knowledge in public affairs
- j. Citizen journalism
- k. Understanding social media
- l. Social media concept and strategies
- m. Social media in military

In general, there were the same obstacles in the implementation of the workshop and IBPAOC, as follow:

- a. Many of the participants understood English just a little or didn't understand at all, although it had been clearly explained at the beginning that the participants should speak English to take part in the activity. It didn't just happen to Indonesian participants, but also to foreign participants who didn't speak English well.
- b. The participation of participants who didn't relate to public affairs work.

- a. Untuk mengatasi kendala bahasa, Badiklat telah menyediakan translator dan peralatannya yang cukup membantu beberapa siswa. Untuk penugasan yang semua materinya berbahasa Inggris, diupayakan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, walaupun tidak semua dapat dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya.
- b. Upaya keras untuk memastikan bahwa seluruh siswa, baik yang bekerja di bidang *public affairs* maupun yang tidak, agar memahami pelajaran. Namun pada akhirnya, mengingat kesulitan yang tinggi untuk mereka memahami dalam waktu yang singkat, maka harus menurunkan standar penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas, didorong terus agar mereka tetap mengerjakan dan mengumpulkan

It didn't cause much problem to the workshop, but it was difficult in IBPAOC. Subjects for IBPAOC had been designed for public affairs officers who understood the job, so that the organizer spent much time to accommodate their needs while it could've been used effectively to develop the participants' capacity in public affairs.

- c. In IBPAOC, participants got many assignments and exercises to know to what extent they understood the subjects. Those who didn't work in public affairs, didn't know how to make the home works, so that during the first week, many of them didn't do their home works.

Efforts to solve the problems include:

- a. To overcome the language obstacle, the Education and Training Body provided a translator and equipment which assisted



Sumber: Puskom Publik Kemhan



Sumber: Puskom Publik Kemhan

tugas. Sanksi tidak menerima sertifikat diterapkan, bila tetap tidak mengerjakan tugas.

Kesimpulan.

- a. Bidang *public affairs* di lingkungan Kemhan dan TNI bukanlah hal yang baru, tetapi masih terasa asing. Oleh karena itu perlunya kesadaran tentang pentingnya bidang *public affairs* dalam upaya untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat secara langsung maupun melalui media massa. Hal ini dapat tercapai dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi *public affairs* kepada seluruh personel.
- b. *Public affairs* bukanlah kerja individu, melainkan kerja sama antar semua instansi untuk menghasilkan bidang *public affairs* yang kuat. Untuk itu diperlukan kesamaan visi dan misi

some participants. For assignments in English, the subjects had been translated into Bahasa Indonesia, though not all due to limited time and resources.

- b. Strong efforts to ensure that all participants, whether or not they worked in public affairs, understood the subjects. However, due to the difficulty to understand the subjects in such a short time, the standard of assessment should be lowered from what had been determined previously.
- c. Those who didn't do the home works, were encouraged to do and collect the home works anyway. Otherwise, they wouldn't get any certificate.

Conclusion

- a. Public affairs in the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces are not new, yet not familiar yet. There

public affairs antar angkatan di TNI dan juga dengan Kemhan.

- c. Untuk mempunyai *public affairs* yang profesional dan kuat di bidangnya harus banyak melaksanakan pelatihan *public affairs* secara sistematis dan terstruktur serta adanya *study banding* secara berkala untuk menghasilkan sumberdaya bidang *public affairs* yang mumpuni dan berwawasan luas, yang bisa mengembangkan tugas-tugas *public affair* yang akan semakin kompleks di masa depan.
- d. Kegiatan workshop dan IBPAOC yang bekerja sama dengan pemerintah Kanada adalah salah satu wujud awal pengembangan *public affairs* yang diharapkan akan terus berkembang di masa datang. Kerja sama ini juga merupakan salah satu upaya mempererat hubungan bilateral antara pemerintah Kanada dengan Indonesia, sehingga kedepannya kegiatan seperti ini jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja tapi juga dari berbagai sudut pandang lain yang bisa memberi manfaat untuk TNI, Kemhan dan Bangsa Indonesia pada umumnya.***

should therefore be an awareness of the importance of public affairs in maintaining good relations with the public directly or through the media. It can be obtained by organizing a counselling or socialization of public affairs to personnel.

- b. Public affairs are not an individual work, instead it's cooperation amongst all institutions to produce strong public affairs. It requires a same vision and mission of public affairs amongst forces of the Indonesian Armed Forces and with the Ministry of Defense.
- c. To achieve the goal of professional and strong public affairs, a strong foundation of the public affairs must be built. Considering this, systematic and structured public affairs trainings are required to produce qualified public affairs resources, who can carry more complicated public affairs tasks in the future.
- d. The workshop and IBPAOC in cooperation with the Canadian government were an initial effort to develop public affairs, expected to continue to develop in the future. The cooperation was also one of the efforts to tighten bilateral relations between the Canadian and the Indonesian governments. In the future, such an activity should be seen from various points of view that can be beneficial for the Indonesian Armed Forces, the Ministry of Defense and the Indonesian people in general.***

TANTANGAN DAN TUGAS MISI PERDAMAIAAN DUNIA BAGI TNI

CHALLENGES AND DUTIES OF THE WORLD PEACE MISSION FOR THE INDONESIAN ARMED FORCES

Oleh: Letkol Caj (K) Nita Siahaan M.Sc
Kasi Perijinan Protjin Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan

Konflik yang terjadi di dunia berdampak pada kehidupan masyarakat. Setiap konflik mengakibatkan terjadinya pembunuhan warga sipil dan pengungsian yang diikuti dengan kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Organisasi dunia (UN) berperan penting dalam penyelesaian konflik tersebut, berusaha menjamin situasi kondusif pasca berakhirnya konflik serta memperbaiki kehidupan umat manusia baik secara psikologi sosial dan kemapanan negara itu sendiri untuk menata pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya kembali.

PBB (UN-United Nations) yang didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945, bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKO)/ Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (MPP) merupakan “flagship enterprise” dari PBB dalam rangka turut menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Saat ini, PBB menghadapi tantangan dalam menutup gap antara *supply* dan *demand* dalam berbagai MPP PBB. Pada awalnya peran MPP PBB hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sehingga usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun dengan berakhirnya perang dingin, menjadikan konteks MPP PBB berubah dari misi “tradisional” yang mengedepankan tugas-tugas militer, menjadi misi yang lebih “multidimensional” dalam rangka melaksanakan perjanjian damai secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Conflicts that take place in the world affect the life of the people. Every conflict causes killing and evacuation of civilians followed by a shortage of resources to fulfill daily needs. The UN plays an important role in solving the conflicts, guarantees a conducive situation post-conflicts, and improves the social-psychological life of the people and establishment of the country itself to recover the government and life of the people.

The United Nations, established in San Francisco on October 24th, 1945, is aimed at keeping the world peace and security. The UN Peacekeeping Operations (UN PKO) is a flagship enterprise of the UN in keeping international peace and security. At present, the UN is facing challenges to cover the gap between supply and demand in its various missions. Initially, the UN PKO's role was limited at keeping truce and stabilizing situation on the field to allow political efforts to solve conflicts. However, with the end of the cold war, the UN PKO has changed its “traditional” mission that prioritized military duties to a more “multidimensional” mission to implement peace agreement comprehensively and help set up foundation for the creation of sustainable peace.

There have also been changes in the characters that the UN PKO has to face. Previously, the UN PKO faced conflicts between countries; currently, the UN PKO is required to get involved in various internal conflicts and civil wars. Despite obstacles (for example, the cases in Rwanda and Somalia) in the peace mission, the UN is believed to be the only body that has the capability to protect and create



Sumber: Kemhan/TNI

Sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya MPP PBB harus menghadapi konflik antar negara namun saat ini MPP PBB dituntut pula untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. Meskipun ada beberapa batu sandungan (misalnya, kasus Rwanda dan Somalia) dalam misi perdamaian yang telah dilakukan PBB, namun tetap harus diyakini bahwa PBB adalah satu-satunya badan yang memiliki kemampuan untuk melindungi dan menciptakan perdamaian bagi negara-negara di dunia. Jika PBB ingin mempraktekkan *peacekeeping* yang efektif, maka PBB tidak boleh memberikan peluang kepada negara besar atau koalisi besar seperti NATO untuk mengendalikan langkah yang ingin ditempuh. PBB juga harus selalu meningkatkan kapabilitasnya untuk terlibat di setiap wilayah konflik. Ada beberapa hal yang mendukung ke arah perbaikan ini, misalnya pembentukan *Rapidly Deployable Mission Headquarters* (RDMHQ) dan *UN Standby Arrangement System* (UNSAS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan rentang dari sumber *peace keeping* yang disediakan oleh

peace for countries throughout the world. If the UN intends to practice an effective peace-keeping mission, it should not allow big countries or coalitions such as NATO to control its steps. The UN must also increase its capability to get involved in every conflicting area. There are some points that support the improvement, including establishment of the Rapidly Deployable Mission Headquarters (RDMHQ) and the UN Standby Arrangement System (UNSAS), aimed at increasing quality and range of the peacekeeping source provided by the Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Further is the Standby High Readiness Brigade (Shirbrig) raised by Denmark with a total number of 4.000 – 5.000 personnel, able to be sent to conflicting areas in 13 – 15 days.

With reference to the dynamics of the UN's peacekeeping roles, there's a strong indication that its peacekeeping role will increase in the future. There are four reasons of this, including: **First**, the increasing capacity of the Security Council in conducting peace operations and the large support and increased authority to use military forces that include giving direct sanctions. **Second**, the increasing and stronger

PERTAHANAN



Sumber: Kemhan/TNI

Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Selanjutnya adalah *Standby High Readiness Brigade* (Shirbrig) yang digalang oleh Denmark dengan jumlah pasukan 4.000-5.000 personil yang mampu dikirim ke daerah konflik dalam tempo 13-15 hari.

Mengacu pada dinamika peranan PBB dalam misi perdamaian, maka terdapat indikasi yang kuat terhadap peran PBB sebagai penjaga keamanan akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Ada empat alasan mengenai hal ini; **Pertama**, meningkatnya kapasitas yang dimiliki DK dalam melakukan tindakan operasi perdamaian disertai dengan besarnya dukungan dan peningkatan otoritas penggunaan pasukan militer, termasuk pemberian sangsi secara langsung. **Kedua**, semakin meningkat dan menguatnya penegakan terhadap demokratisasi, HAM, dan isu-isu kemanusiaan, akan memberikan legitimasi bagi negara-negara untuk memberikan perhatian pada kejadian-kejadian yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, melanggar HAM dan mengancam harkat hidup orang banyak. **Ketiga**, masih banyaknya konflik internal yang terjadi, apakah itu karena krisis pemerintahan atau perang saudara. Ini akan membawa dampak pada semakin banyaknya pengungsi

democratization, human rights, and humanitarian issues will legitimate countries to pay attention to incidents that are against democracy principles, violate the human rights, and threaten the dignity of life of many people. **Third**, the large number of internal conflicts, whether because of government crisis or civil wars. It will result in a large number of refugees flowing from the conflicting areas to other countries, which will end up in drawing attention of the world and the UN to take actions. **Fourth**, the increasingly rapid information that turns the world to be quite transparent. There's hardly unreachable part of the world. It attracts and encourages the UN to hold peace operations and preparedness to enter a conflicting area.

In Asia, there are three large Troops Contributing Countries (TCC), including Pakistan, India, and Bangladesh. Indonesia is one of the TCC, although it's incomparable to the three countries. These three countries quite intensively send personnel, both military as well as police. Although Indonesia is not categorized the world's three large TCC, its participation significantly develops. The sending of personnel of the Indonesian Armed Forces increases from year to year. At present, personnel of the Indonesian Armed Forces joint in the peace

yang mengalir dari daerah konflik ke negara lain yang pada akhirnya akan mengundang perhatian dunia dan PBB untuk mengambil tindakan. **Keempat**, peningkatan informasi yang sedemikian pesat sudah membuat dunia menjadi sangat transparan, dan hampir tidak ada permukaan bumi yang tidak terjangkau. Hal ini sekaligus menjadi faktor penarik dan pendorong bagi PBB untuk menggelar operasi perdamaian, dibarengi dengan kesiagaan untuk masuk ke daerah konflik.

Di Asia ada tiga negara penyumbang besar pasukan (*Troop Contributing Countries*) yaitu Pakistan, India dan Bangladesh. Indonesia termasuk negara penyumbang pasukan meskipun belum sebanding dengan ketiga negara tersebut. Ketiga negara tersebut di atas sangat intens dalam mengirimkan personel baik militer maupun polisinya. Meskipun Indonesia sebagai TCC belum masuk dalam tiga besar dunia, namun partisipasi Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pengiriman

mission, is divided into several assignments, including contingent troops, military observers, staff officers, to warships that are joint in the Maritime Task Force (MTF). It can be materialized thanks to Indonesia's proactive efforts in creating the world peace and trust by the UN and countries that are directly affected by the conflicts.

Dedication of the Indonesian Armed Forces to the peace mission is implemented according to the principle in Chapter VI of the UN Charter, in which the UN is not allowed to use firepower to solve conflicts. Therefore, the Indonesian Armed Forces' involvement in the world peace mission is solely to keep peace rather than to make wars with conflicting parties in the mission destination countries. Some other TCCs have a different principle in the peace mission, being guided by Chapter VII of the UN Charter, which allows the use of firepower in solving conflicts. Practically, the world peacekeeping operation is a combination of Chapters VI and VII of



Sumber: Kemhan/TNI

PERTAHANAN

personel TNI dari tahun ke tahun juga telah mengalami peningkatan. Saat ini, personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian terbagi dalam beberapa penugasan, antara lain mulai dari Pasukan Kontingen, Pengamat Militer, Perwira Staf sampai dengan Kapal Perang (KRI) yang tergabung dalam *Maritime Task Force* (MTF). Hal ini dapat terwujud berkat upaya proaktif bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh PBB maupun negara-negara yang merasakan dampak langsung akibat konflik.

Implementasi dedikasi TNI pada misi perdamaian dilaksanakan sesuai dengan prinsip Bab VI Piagam PBB dimana tidak menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan konflik. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian dunia semata-mata dilakukan untuk memelihara perdamaian dan bukan untuk berperang dengan pihak-pihak yang bersengketa di negara tujuan misi. Beberapa negara penyumbang pasukan lainnya menganut prinsip yang berbeda dalam pelaksanaan misi perdamaian yaitu dengan berpedoman pada Bab VII Piagam PBB yang mana dapat menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan konflik. Dalam prakteknya, operasi pemeliharaan perdamaian dunia merupakan gabungan antara Bab VI dan VII Piagam PBB tentang penyelesaian konflik, sehingga penggunaan senjata untuk kepentingan membela diri dapat dibenarkan. Penggunaan senjata untuk kepentingan membela diri bukan penggabungan dari Chapter VI dan VII tapi salah satu dari tiga prinsip dasar PKO (UN). Ada tiga prinsip dasar dasar UN PKO : *Consult of the conflicting parties, non use of force except for self defense and impartially*. Kendati adanya penerapan kebijakan yang berbeda dari masing-masing negara tersebut, pelaksanaan misi perdamaian bisa dikatakan dapat berjalan dengan baik karena memang sejak awal Dewan Keamanan PBB selalu mempertimbangkan penempatan personel yang terlibat di suatu misi disesuaikan dengan



Sumber: Puskompublik Kemhan



kebijakan negara masing-masing.

Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian dunia telah meraih beragam prestasi, antara lain kemampuan para prajurit TNI yang dapat melaksanakan *Win Heart and Minds* masyarakat setempat. Selain itu profesionalisme prajurit TNI yang melekat pada jati dirinya tetap memegang teguh prinsip impartial sebagai pasukan Baret Biru. Hal ini sangat penting dan harus dipegang teguh oleh setiap anggota TNI di daerah misi. Dengan demikian keberadaan mereka bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat setempat. Kemampuan pendekatan sosial prajurit TNI tersebut sebenarnya tidak ada dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) melainkan adanya kepedulian dan perhatian yang sangat serius yang ditunjukkan oleh TNI kepada masyarakat setempat sehingga mereka dapat merasakan suasana batin masyarakat. Keadaan ini sangat membantu mereka dalam mengatasi hambatan budaya maupun bahasa setempat.

Secara strategis dan ekonomis partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Salah satu produk Indonesia yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah kendaraan militer lapis baja (ANOA) yang diproduksi oleh PT. Pindad. Berdasarkan pengalaman serta potensi sumber daya yang dimilikinya, Indonesia dalam hal ini TNI tentunya dapat memiliki peran yang lebih besar dalam satu dekade mendatang. Hal ini tercermin dengan telah ditunjuknya Mayor Jenderal TNI Imam Edy Mulyono untuk menjadi *Force Commander* misi MINURSO di Sahara Barat oleh Sekjen PBB pada bulan Agustus 2013. Posisi *Force Commander* merupakan jabatan strategis setingkat *Assistant Secretary General*. Semakin banyak Indonesia menempatkan Perwira Tinggi pada jabatan-jabatan strategis di *UN Mission*, maka ranking Indonesia akan semakin terangkat dan menjadi sejajar dengan negara-negara TCC

the Charter on solving conflicts, so that using weapons for self defense shall be justified. The use of weapons for self defense is not a combination of Chapters VI and VII, instead it's one of the three basic principles of the UN PKO. The three basic principles of the UN PKO include: consult of the conflicting parties, non use of force except for self defense, and to be impartially. Despite the different policy of the countries, the peace mission can be said to run well as from the beginning, the UN Security Council has always adjusted personnel placement involved in a mission according to the respective country's policy.

The Indonesian Armed Forces involvement in the world peace mission has given them various achievements, including the capability of the Indonesian Armed Forces soldiers to implement Win Heart and Minds of the local people. In addition, professionalism of the Indonesian Armed Forces soldiers that adheres in their identity, upholds the impartial principle as the Blue Beret troop. It's very important and must be upheld by every member of the Indonesian Armed Forces in the mission region. Therefore, the local people can take direct advantage of their presence. The capability of social approach of the Indonesian Armed Forces soldiers is actually not mentioned in the Standard Operating Procedure (SOP). The Indonesian Armed Forces soldiers show serious care and attention to the local people so that they can feel the moods of the people. It really helps them in solving both the local cultural as well as language obstacles.

Strategically and economically, Indonesia's participation in the peacekeeping mission can be taken advantage to encourage development of the national strategic defense industry. One of the Indonesian products used in the peacekeeping mission is armored military vehicle (ANOA) produced by PT. Pindad. Based on the experience and resources potential, Indonesia – in this case, the Indonesian Armed Forces – will certainly play a more important



lainnya. Sebaliknya semakin sedikit Indonesia menempatkan posisi strategis tersebut *bargaining position* RI akan semakin lemah. Dukungan penuh dari bangsa Indonesia serta pemerintah kiranya dapat menjadi momentum bagi TNI untuk dapat berperan maksimal di lingkup global sebagai salah satu komponen kekuatan nasional.

Beberapa hal yang belum dilaksanakan oleh PMPP TNI kiranya dapat dipertimbangkan untuk menjadi pemikiran kedepan menuju peacekeeper kelas dunia, antara lain:

- **Blueprint Peacekeeper Indonesia**

Hal ini mencakup perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategis (jangka menengah) yang menjadi pedoman dalam perencanaan jangka pendek. *Blueprint* ini dapat menjamin konsistensi menuju sasaran yang diharapkan.

- **Global Partnership**

Seiring dengan reformasi di tubuh organisasi Dewan Keamanan PBB, TNI

role in the next one decade. It's shown by the appointment of Major General Imam Edy Mulyono as Force Commander of MINURSO in West Sahara by the UN Secretary General in August 2013. Force Commander is a strategic position of the same level of Assistant Secretary General. The more Indonesia places senior officers in strategic positions at the UN missions, the more increased Indonesia's ranking will be, parallel to the other TCCs. On the contrary, the less Indonesia places senior officials in strategic positions, the weaker Indonesia's bargaining position. Full support of the Indonesian people and government can be a momentum for the Indonesian Armed Forces to play a maximum role in the global scope as one of the national strength components.

Some things that the Indonesian Armed Forces Peacekeeping Force may take into consideration to become world-class peacekeepers, include:

- **Indonesia's Peacekeeper Blueprint**

It includes long-term planning and (medium-term) strategic planning that serve as a guideline

dapat memanfaatkan kontribusi negara-negara donor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional serta jaringan negara penyumbang pasukan untuk dapat melaksanakan pelatihan dan penyiapan *peacekeeper* internasional di Indonesia. Hal ini tentunya harus selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

- **Lembaga *think tank* pendidikan, dan penelitian keamanan dan perdamaian.**

Mencermati konflik yang terjadi saat ini, tidak menutup mata juga bahwa konflik masih terjadi di sekitar kita. Apabila dapat diwadahi, kiranya pengalaman serta wawasan yang didapatkan oleh personel TNI maupun personel lain yang pernah bertugas di area konflik dapat dijadikan pembelajaran (*lesson learned*) untuk solusi penanganan konflik dalam negeri maupun misi yang lain. Kegiatan ini tentunya melalui kerjasama dengan para pakar, praktisi pasca konflik, serta lembaga-lembaga yang berkepentingan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Pemberian materi pemeliharaan perdamaian dalam lembaga pendidikan TNI baik pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan, materi yang sama dapat juga diberikan pada lembaga pendidikan umum melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- **Vision 4.000 Peacekeepers**

Sesuai dengan amanat konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai *net contributor* dari perdamaian. Visi Indonesia dalam hal ini adalah dalam kurun waktu dua tahun (2015-2016) untuk mencapai 4.000 *Indonesian Peacekeepers*. Dalam beberapa tahun yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk sepuluh besar penyumbang pasukan (*Troop/Police Contributing Countries*) di UN PKO.

in the short-term planning. The blueprint can guarantee consistency to the expected target.

- **Global Partnership**

In line with the reform in the organization of the UN Security Council, the Indonesian Armed Forces can take advantage of the contribution of donor countries, non-government organizations, international organizations and TCC network to execute training and preparation of international peacekeepers in Indonesia. It must certainly be consistent with Indonesia's foreign political policy.

- **Education think tank institution, and security and peace research.**

Watching the current conflicts, it's undeniable that conflicts still take place around us. If they can be accommodated, the experiences and insights of the Indonesian Armed Forces personnel and other personnel who were once assigned in conflicting areas, can be a lesson learnt to solve both domestic conflicts as well as other missions. The activities are certainly implemented through cooperation with experts, post-conflict practitioners, and related institutions both government as well as non-government. Subjects on peacekeeping in the Indonesian Armed Forces education institutions, both establishment as well as development education, can be provided at general education institutions through cooperation with the Ministry of Education and Culture.

- **4.000 Peacekeepers Vision**

According to the mandate of the constitution and instruction of the President of the Republic of Indonesia, the Indonesian government will continue to increase its participation in the UN PKO as a net contributor of peace. Indonesia's vision is that in two years (2015 – 2016), it will have 4,000 peacekeepers. In several years, it's expected that Indonesia will become the ten largest TCC in the UN PKO.



Sumber: <https://kultinta.com>

- **Meningkatkan Jumlah dan Kapasitas Wanita TNI sebagai Women Peacekeeper**

Resolusi 1325 sebagai suatu pernyataan yang revolusioner dari Dewan Keamanan PBB mengamanatkan upaya meningkatkan jumlah merata partisipan wanita dalam seluruh usaha-usaha mempertahankan, mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Wanita Pemelihara Perdamaian (*Women Peacekeepers*) telah membuktikan kemampuannya bahwa mereka dapat tampil dalam aturan main yang sama, dalam standar yang sama, dan didalam kondisi dengan tingkat kesulitan yang sama; sebagaimana halnya bagi seorang mitra-kerja yang saling bahu-membahu bekerjasama di lapangan. Pimpinan TNI senantiasa memberikan kesempatan yang terbuka lebar bagi Wanita TNI untuk menapak karirnya sebagai *Women Peacekeeper*. TNI telah mengirimkan KOWAD, KOWAL, dan WARAL dalam berbagai misi perdamaian di bawah bendera PBB. Tantangan TNI selanjutnya adalah meningkatkan jumlah wanita TNI yang bergabung dalam misi perdamaian yang tentunya diikuti dengan memastikan peningkatan kapasitas wanita TNI dalam misi perdamaian tersebut.

- **To increase the number and capacity of Women Peacekeepers**

Resolution 1325 as a revolutionary statement of the UN Security Council gives a mandate to increase the number of women in efforts to keep and support the world peace and security. The women peacekeepers have proved their capability in the same procedure and in the same level of difficulty, as in how partners work shoulder to shoulder on the field. Management of the Indonesian Armed Forces will always give opportunities to Indonesian women soldiers to develop their career as women peacekeepers. The Indonesian Armed Forces have sent Women Army Corps, Women Navy Corps, and Women Air Force Corps in various peace missions under the UN flag. The next challenge for the Indonesian Armed Forces is to increase the number of women soldiers in peace missions, which will certainly be followed by increasing their capacity in the peace missions.

- **Increasing civilians' roles in the peace keeping mission.**

Traditionally, the UN PKO means truce and situation stabilization on the field as

- **Peningkatan peran sipil dalam pemeliharaan perdamaian.**

Dalam pengertian tradisional peran UN PKO terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan sampai usaha-usaha politik untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan. Namun sekarang, misi UN PKO diharapkan dapat juga membawa misi yang lebih multidimensional dalam rangka mengimplementasikan perjanjian perdamaian secara komprehensif dan membantu meletakkan dasar-dasar bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dengan sifat *peacekeeping* yang semakin multidimensional, Indonesia juga mendorong pentingnya kontribusi pakar sipil dalam misi peacekeeping dan peacebuilding. Indonesia bersama Kanada merupakan *co-chairs* pada forum *Consultative Group on Civilian Capacity Review* (CGCCR). Indonesia juga telah memprakarsai resolusi mengenai *civilian capacity in the aftermath of conflict* pada SMU PBB (Maret 2012) yang disahkan secara konsensus. Selain itu pengalaman Indonesia dalam upaya mediasi di tingkat nasional maupun internasional menjadi potensi untuk mengirimkan pakar sipil dalam berbagai program *peacebuilding* PBB, seperti di bidang revitalisasi ekonomi dan *basic safety and security*.

Saat ini banyak warga negara Indonesia yang sudah pernah ataupun masih tergabung dalam *Civilian Experts* Garuda Merah Putih sebagai individu-individu yang karena keahliannya dapat bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Keberadaan Pusat Pelatihan PMPP di Sentul yang saat ini masih terbatas untuk kalangan militer, tentunya kedepan dapat menjadi Pusat Pelatihan dan Penyiapan setiap warga negara Indonesia baik sipil maupun militer yang dengan sukarela mendharmabaktikan untuk misi pemeliharaan dunia. *Civilian Experts* yang ada saat ini dapat menjadi narasumber serta rujukan dalam mewujudkan hal tersebut.***

well as political efforts to solve conflicts. At present, the UN PKO is expected to bring a more multidimensional mission to implement a comprehensive peace agreement and help place foundation for the creation of sustainable peace. Having a more multidimensional peacekeeping character, Indonesia also encourages contribution of civilian experts in the peacekeeping and peacebuilding missions. Indonesia and Canada are co-chairs of the Consultative Group on Civilian Capacity Review (CGCCR) forum. Indonesia has also initiated a resolution on civilian capacity in the aftermath of conflict at the UN General Assembly (March 2012), which was passed in consensus. In addition, Indonesia's experience in mediating efforts in both national and international levels, is a potential to send civilian experts to various UN peacebuilding programs, such as economic revitalization and basic safety and security.

Many Indonesians are currently joining the Garuda Merah Putih civilian experts as individuals, who due to their expertise, can join the world peacekeeping mission. The Peacekeeping Training Centre in Sentul, which is currently limited to the military circle, can certainly be a Training Centre for every Indonesian citizen in the future, both civilian as well as military, who will voluntarily dedicate themselves to the world peacekeeping mission. The existing civilian experts can be a source to materialize it.***





“MEMPERKOKOH STABILITAS NASIONAL MELALUI PENGUATAN HUBUNGAN POLRI DAN KPK”

“STRENGTHENING NATIONAL STABILITY THROUGH THE
STRENGTHENING OF RELATIONS BETWEEN THE INDONESIAN
POLICE AND THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION”

Oleh: Letkol Inf Evendi,S.E, M.Han
Analis Muda Subdit Jaklak Ditjakra Ditjen Strahan Kemhan

Perseteruan dan rivalitas antara kepolisian dengan KPK berujung permintaan KPK kepada Panglima TNI untuk melibatkan TNI menjaga Gedung KPK untuk menghindari terjadinya perkelahian antara dua institusi penegak hukum tersebut. Kondisi ini sudah menunjukkan adanya gejala rasa tidak aman bagi pihak KPK. Disatu sisi, KPK yang dibentuk pada saat korupsi sudah menggurita pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti tidak tersentuh hukum saat itu, disisi lain kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat berbuat banyak untuk memberantas korupsi.

Keberadaan KPK akan hilang manakala kinerja kepolisian sudah baik dan dapat memberantas korupsi di tanah air. Ternyata harapan untuk mengatasi korupsi belum mampu dilaksanakan Polri, sehingga KPK selalu tampil dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Masyarakat menjadi senang dan bangga dengan kinerja KPK, kecintaan kepada KPK begitu tinggi dari semua golongan masyarakat sampai ke masyarakat terendah (*Grass roots*). Sebaliknya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri stagnan dan tidak mampu menarik simpati masyarakat ditambah meningkatnya kejahatan akhir-akhir ini. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa kedua institusi penegak hukum ini selalu terjadi perseteruan yang dampaknya sangat merugikan masyarakat.

KPK harus di jaga dan koruptor harus di hukum seberat-beratnya. Kata ini yang sering

The feud and rivalry between the Indonesian Police and the Corruption Eradication Commission ends up in the request by the Corruption Eradication Police to Commander of the Indonesian Armed Forces to involve the Indonesian Armed Forces to safeguard the commission's office building to prevent any fight between the two law enforcement institutions. Such a condition indicates an unsecure feeling of the Corruption Eradication Commission. On one hand, the Corruption Eradication Commission, which was set up when corruption had spread to every sector in the community, seems untouchable by the law.

On the other hand, as a law enforcer, the Indonesian Police doesn't do much to eradicate corruption. The Corruption Eradication Commission will no longer exist when the Indonesian Police has already good performance and is able to eradicate corruption in the country. Apparently, the Indonesian Police is unable yet to solve corruption, so that the Corruption Eradication Commission is always present in efforts to eradicate corruption indiscriminately. The people then become fond and proud of the Corruption Eradication Commission. The affection is so high at all levels of community, from the highest to the grassroots. On the contrary, the people's trust to the Indonesian Police is stagnant; the institution is unable to attract sympathy from the people; not to mention the increasing crimes, in terms of both quality as



Sumber : <https://www.infobreakingnews.com>

disuarakan oleh semua elemen masyarakat. Mereka (masyarakat) beranggapan koruptor musuh yang paling besar, keberadaannya tidak sesuai dengan cita-cita pahlawan bangsa, yang telah berkorban jiwa dan raganya serta keluarganya, masyarakat menginginkan suatu bangsa yang merdeka penuh kedamaian dan sejahtera rakyatnya. Cita-cita itu sampai hari ini belum tercapai dan makin jauh rasanya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mempekokoh stabilitas nasional melalui penguatan hubungan Polri dan KPK antara lain :

- a. Stabilitas Nasional tercipta manakala tata kelola pemerintahan pada bidang hukum yang optimal dapat terlaksana. Hubungan Kepolisian dan KPK saling bersinergi, oleh karena itu, pelaksanaan pemberantasan korupsi perlu diletakkan dalam fondasi kepentingan nasional. Beberapa urusan yang melibatkan kewenangan Kepolisian dan KPK dapat

well as quantity. It may be the reason of the feud between the two law enforcement institutions. .

The Corruption Eradication Commission must be safeguarded and corruptors must be punished to the most severe, as often stated by all elements of the community. The people consider corruptors as their biggest enemy, of which the presence doesn't suit the goal of the nation's heroes who have sacrificed their body and soul as well as family. The people want to be an independent, peaceful and prosperous nation. Such a goal has not been achieved so far, instead it becomes further.

Efforts to strengthen national stability through the strengthening of relations between the Indonesian Police and the Corruption Eradication Commission include:

- a. National stability will be materialized when there's optimal governance in the legal aspect. Relations between the Indonesian Police and the Corruption Eradication



Sumber: <http://weebee9.com>

diselesaikan melalui wadah sinkronisasi kebijakan yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi Kepolisian bersama KPK harus bersinergi dan berkoordinasi dalam bertindak perlu meningkatkan pengawasan terhadap dana dekonsentrasi yang langsung menyentuh masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari KPK dan kepolisian di dalam upaya pemberantasan korupsi.
- c. Kepolisian dan KPK harus dapat memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai Pancasila harus terus disosialisasikan dan dipraktekkan agar tercipta stabilitas

Commission are mutually synergized, so that corruption eradication must be based on the national interest. Some matters that involve the authority of the Indonesian Police and the Corruption Eradication Commission can be solved through synchronization of the policies, which will then be regulated in legislation.

- b. To maximize efforts to eradicate corruption, the Indonesian Police and the Corruption Eradication Commission must synergize and coordinate their efforts, and increase supervision on the de-concentration fund that directly touches the people, such as in education and health, so that the people can really take advantage of the Corruption Eradication Commission and the Indonesian Police in corruption eradication.
- c. The Indonesian Police and the Corruption

nasional yang mantap sehingga pembangunan dapat berjalan dengan sukses.

Upaya optimalisasi tata kelola institusi penegak hukum didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu rekrutmen dan pembinaan aparat Kepolisian dan KPK perlu menekankan pada aspek integritas, kompetensi, latar belakang pendidikan dan kesatuan visi aparatur, sehingga pada saatnya akan terbentuk aparatur penegak hukum yang profesional, mampu memecahkan persoalan bangsa, berorientasi pelayanan dan mengutamakan pengabdian kepada negara dan bangsa.***

Eradication Commission must be able to give an example and be a role model to the people so that the people don't get trapped in the short-term political interest that may divide the unity of the nation. The values of Pancasila must be continuously socialized and practiced to create strong national stability so that development can run successfully.

To optimize the governance, the law enforcement institutions are supported by quality human resources. Therefore, recruitment and development of the Indonesian Police and the Corruption Eradication Commission personnel must emphasize the aspects of integrity, competence, educational background, and the vision unity so that it can form professional law enforcement personnel, who are capable to solve the nation's problems, service-oriented, and prioritize dedication to the country and nation.***



Sumber: <http://kepolisian.wordpress..com>

FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA

THE FUNCTION OF DEFENSE RESEARCH AND DEVELOPMENT TO SUPPORT AUTONOMY IN THE NATIONAL DEFENSE

Oleh: Ari Fanti, S.Psi and Dr. Nina Ruslinawati, S.Sos, MM

PENGANTAR

Menhan dalam forum komunikasi penelitian dan pengembangan pertahanan (Forkom Litbang Pertahanan) ke 25 tahun anggaran 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014 di Subang menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya tidak hanya mampu memproduksi alutsista sendiri tetapi juga mampu menjual ke luar negeri. Sementara itu, Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Fakta yang ada sampai saat ini kondisi pertahanan Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bergantung kepada negara lain terutama dalam hal Alutsista. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang penting bagi Badan Litbang untuk mampu menjawab semua tantangan ini dalam mencapai kemandirian industri pertahanan.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN (LITBANGHAN)

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang penelitian dan pengembangan bidang pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 :

1. Ayat (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan

INTRODUCTION

In a 25th communication forum of defense research and development for the budget year 2014, held on September 11th, 2014, in Subang, the Minister of Defense stated that a country should not be able to only produce its own main weaponry system, but also to sell it abroad. Indonesia is still far behind the expectation.

The current fact is that in maintaining integrity and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the country still depends on other countries in the main weaponry system. It's an important homework for the Research and Development Department to respond the challenge in order to realize autonomy in the defense industry.





Sumber: Puskompublik Kemhan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan pengertian di atas maka penelitian terdiri dari dua proses yaitu pembentukan hipotesa yang dirumuskan dari data, fakta dan teori yang telah ada sebelumnya, serta tahap kedua adalah proses verifikasi terhadap hipotesa untuk menarik kesimpulan. Proses pertama akan selalu mengembangkan teori-teori berdasarkan teori yang ada sebelumnya serta fakta-fakta yang terjadi di alam sehingga akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Pada proses yang kedua yaitu verifikasi sebenarnya merupakan proses penyaringan hipotesa, hipotesa yang benar dapat dikatakan menambah khasanah ilmu pengetahuan sedangkan hipotesa yang salah akan membersihkan

DEFENSE RESEARCH AND DEVELOPMENT

According to the Regulation of the Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 39/2011 on defense research and development at the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, Article 1:

1. Paragraph (1) Research is an activity conducted according to a systematic scientific rule and method to obtain information, data and explanation related to the understanding and verification of the truth or untruth of a assumption and/ or hypothesis in science and technology, and to draw a scientific conclusion for science and technology.

According to the above understanding, research consists of two processes, including formation of a hypothesis which is formulated from existing data, facts and theory, and verification of the hypothesis to draw a conclusion. The first process will always develop theories based on the existing theories and facts so that it



Sumber: Puskompublik Kemhan

ilmu pengetahuan dari kesalahan. Sesuai dengan tahapan proses penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara membersihkan ilmu pengetahuan dari kesalahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dari hasil penelitian.

2. Ayat (2) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Sesuai dengan pengertian pengembangan maka pengembangan harus mempunyai prasyarat yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh lebih dahulu baru kemudian penerapannya pada

will always develop continuous science. In the second process, verification is actually a process to select hypothesis; a correct verification can add science while a wrong hypothesis can clean up science from mistakes. According to the process phases, we can draw a conclusion that research is a process to develop science by cleaning up the science from mistakes and add the science from results of the research.

2. Paragraph (2) Development is an activity of science and technology which aims at taking advantage of the rule and theory of science, of which the truth has been proved to increase the function, advantages and application of the existing science and technology or to produce new technology.

According to the definition, development must then have requirements, including science and technology that must be first obtained, and application on the utilization according to certain purposes.

pemanfaatan sesuai dengan tujuan tertentu. Pengembangan yang bertujuan memanfaatkan ilmu pengetahuan maka tujuannya lebih mengarah kepada pengguna (*user*). Kepentingan *user* harus ditampung dan diimplementasikan dalam pengembangan. Perencanaan pengembangan harus selalu melibatkan *user* mulai dari tahap awal sehingga hasil pengembangan dapat digunakan oleh *user*.

3. Ayat (3) Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah merupakan suatu daur kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk pengujian, penilaian serta pengkajian dalam bidang sistem dan metode, organisasi, insani, materiil dan doktrin yang masing-masing dapat berdiri, maupun sebagai suatu rangkaian bulat yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, hasil penelitian dan pengembangan dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut ke arah pemanfaatan maupun peningkatan.

Proses Litbang yang meliputi kegiatan Litbang, pengujian dan penilaian serta evaluasi merupakan siklus yang berjalan terus-menerus. Pada tiap siklus sebenarnya menghasilkan suatu yang lebih baik karena telah mencakup evaluasi dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Proses Litbang ini secara ringkas dapat dikatakan sebagai proses pembentukan model, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan dan cara menanggulanginya. Proses ini merupakan penyempurnaan terus-menerus yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemodelan merupakan satu perumusan tentang karakteristik yang akan mencakup variabel mana yang berpengaruh, pengaruhnya besar dan pengaruhnya yang kecil. Dari model ini dapat digambarkan

Development aimed at taking advantage of science will lead to the user. The user's interest must be accommodated and implemented in development. The development plan must always involve the user from the initial phase so that result of the development can be used by the user.

3. Paragraph (3) Research and Development, further referred to as R&D is a cycle of research and development activities, including examination, valuation and assessment in the system and method, organization, human, material, and doctrine of which each can be independent, or a whole inseparable series. Results of the R&D are developed and applied further to the utilization and increase.

The R&D process which includes research and development, examination and valuation as well as evaluation is a continuous cycle. Each cycle produces something better as it already includes evaluation of mistakes. In brief, the R&D process can be said as a process of setting up a model, the possibilities of mistakes and the solution. The process is a continuous perfection that can be explained as follows:

- a. Modeling is a formulation on characteristics that include which variables are influencing, major and minor influences. From the model, the characteristics and the major influences can be pictured completely. The major influences can be used to control the model characteristics. Consequently, good R&D will find a way to control the process of the model so that its utilization can be developed in the human life.
- b. The possibility of mistakes is very important in the R&D process

perilakunya secara lengkap, pengaruh-pengaruh yang besar pada model tersebut. Pengaruh variabel yang besar pada model dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku model. Sebagai konsekuensi Litbang yang baik akan menemukan cara untuk mengendalikan proses dari modelnya sehingga dari model tersebut dapat dikembangkan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia.

- b. Kemungkinan terjadinya kesalahan sangat penting dalam proses Litbang karena dari sinilah sebenarnya kegagalan-kegagalan dapat terjadi. Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan perlu dibuat diagram alir yang menggambarkan proses serta logikanya secara menyeluruh tentang kemungkinan terjadinya deviasi-deviasi yang mungkin menjadi sumber kegagalan yang dapat berakibat fatal. Diagram alir ini sering disebut Pohon kegagalan (*Fall Tree*). Proses ini yang meliputi kemungkinan terjadinya kegagalan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan, sehingga proses Litbang menjadi lebih pasti atau lebih besar kemungkinan untuk



Sumber: Puskompublik Kemhan

because this is where failures can happen. To solve the possible failures, a diagram must be made to show the entire process and logics of the possibility of deviations that may be the source of fatal failures. The diagram is often called Fall Tree. The process that includes possibility of failures can be used as a basis to anticipate and solve the possibility of failures, so that the R&D process is more certainly successful.

- c. Failures normally happen to controlling variables which have major influences in the process. The possibility of failures can be solved by regulating the controlling variables so that the process takes place as intended.

The three R&D processes, including modeling, Fall Tree and the way to solve it can be used to ensure success in R&D.

4. Paragraph (11) Defense R&D is a

berhasilnya.

- c. Kegagalan biasanya terjadi pada variabel-variabel yang merupakan variabel pengendali yaitu variabel yang mempunyai pengaruh besar pada proses. Kemungkinan kegagalan dapat ditanggulangi dengan mengatur variabel pengendali sehingga proses dapat berlangsung sesuai dengan yang dikehendaki.

Ketiga proses Litbang yaitu pemodelan, diagram pohon kegagalan dan cara mengatasinya dapat digunakan untuk menjamin keberhasilan dalam Litbang.

- 4. Ayat (11) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan yang selanjutnya disingkat Litbanghan adalah perencanaan proposal Litbang di bidang pertahanan yang disusun secara berencana dan sistematis.

Litbang di Kementerian Pertahanan merupakan satu masalah yang rumit karena menyangkut Iptek yang multi disipliner, adanya keterbatasan penguasaan Iptek personel pelakunya, adanya keterbatasan anggaran untuk Litbang sehingga program Litbang yang dilaksanakan di Kemhan harus dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan bahwa program Litbang harus dilaksanakan secara berencana dan sistematis sehingga hasilnya dapat optimal dalam arti berguna untuk user, dibutuhkan oleh user, tidak terjadi tumpang tindih Litbang di Kemhan dan TNI, dan tidak terjadi kegagalan.

KEMANDIRIAN

Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatan sendiri (Randy R. Wrihatnolo dan

proposal planning of R&D in Defense, which is systematically planned.

Research and Development at the Ministry of Defense is a complicated problem as it relates to multi disciplinary science and technology, limited mastering of science and technology by the personnel, limited budget for the R&D so that it must be optimally implemented. The condition causes the R&D program to be implemented in a planned and systematic way to obtain optimal results in the sense of useful for the user, not to overlap in the R&D at the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, and not to fail.

AUTONOMY

Autonomy is the advance level that a nation must achieve to build and maintain its life sustainability based on its own strength (Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007:79).

Basically, there is no country that is 100% autonomous so that it must increase its autonomy. Indonesia's main weaponry system is not perfect yet either in terms of quantity and quality. The main weaponry system quantity can be developed by producing or buying from abroad. Development of the main weaponry system quality is more complicated compared to the quantity development. Such quality development must be supported by reliable R&D in terms that the R&D can provide the main weaponry system with the same quality as expected by the user.

According to Titik Kristiyani (in Syafaruddin 2012:147), autonomy can mean ability to think, feel, and do something on its own.

Development of the main weaponry system in Indonesia must be considered as the standard requirement of threat prevention. The standard mentioned in the white book of the national defense and security is formulated to



Sumber: Puskompublik Kemhan

Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 79).

Padadasarnya tidak ada negara yang mandiri seratus persen sehingga harus diupayakan meningkatkan tingkat kemandiriannya. Negara Indonesia juga belum sempurna kekuatan Alutsistanya baik dipandang dari kuantitas maupun kualitasnya. Pengembangan kuantitas Alutsista dapat dilakukan dengan memproduksi atau membeli dari luar negeri. Pengembangan kualitas Alutsista lebih rumit dibanding dengan pengembangan kuantitas. Pengembangan kualitas inilah yang harus didukung oleh Litbang yang handal dalam arti Litbang yang mampu memberikan Alutsista yang mempunyai kualitas sebagai mana diinginkan oleh *user*.

Menurut Titik Kristiyani (dalam Syafaruddin 2012 : 147) kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri.

Pengembangan Alutsista di Indonesia harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan *standard* penanggulangan ancaman. *Standard* penanggulangan ancaman yang dicantumkan dalam buku putih pertahanan keamanan negara telah dirumuskan mencakup Alutsista

include the required main weaponry system, personnel, organization and fund. The standard of threat prevention can be used as a basis of the main weaponry system development.

According to Barnadib (in Syafaruddin 2012:147), autonomy is a situation where a person can determine his own actions and behavior. In addition, his initiative, ability to solve obstacles/problems, self confidence and ability to do something without anyone's help can be assessed.

A country with high capability is one that fulfills the standard of threat prevention, has the capability to prevent both potential as well as actual threats.

NATIONAL DEFENSE

Under Law of the Republic of Indonesia No. 3/2002 on National Defense:

1. Article 1: national defense is all efforts to defend the country's sovereignty, the integrity of the Republic of Indonesia, and the safety of the whole nation from threat and disturbance to the integrity of the nation and country.

yang dibutuhkan, personil, organisasi dan dana. Standart penanggulangan ancaman ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Alutsista.

Menurut Barnadib (dalam Syafaruddin 2012 : 147) kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang dan dapat dinilai, meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.

Negara yang mempunyai kemampuan yang tinggi diartikan sebagai negara yang telah memenuhi standard penanggulangan ancaman, akan mempunyai kemampuan untuk menanggulangi seluruh ancaman baik yang potensial maupun yang aktual.

PERTAHANAN NEGARA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara :

1. Pasal 1 pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Pasal 2 hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
3. Pasal 3 pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

2. Article 2: national defense essence is the universal defense efforts of which the execution is based on the awareness of the people's rights and obligations as well as confidence of the self power.
3. Article 3: national defense is aimed at maintaining and protecting the state's sovereignty, integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and safety of the whole nation from any threat.
4. Article 4: national defense has the function to realize and defend the whole area of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
5. Article 6: national defense is organized through the efforts to build and develop the capability, deterrence of the country and the nation, and to prevent any threat.
6. Article 23 paragraph (1): to increase capability to defend the country, the government shall conduct R&D of the defense industry and technology. Paragraph (2): in executing the duties, as mentioned in paragraph (1), the minister shall encourage and promote growth of the defense industry.

The country's efforts to defend its sovereignty, integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and safety of the whole nation from threat and disturbance towards the nation and country's unity must be technologically preceded by capability to detect as early as possible any possible threat and the progress. Based on the possibility of the threat, a prevention method has been formulated. The early-detection concept meets with the defense philosophy in Indonesia, that is active defense, which means that Indonesia will not attack another country unless its interest is disturbed. In terms of technology, the active defense strategy has difficult consequences as there are two requirements to fulfill, including the capability to early detect any threat and

4. Pasal 4 pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah.
5. Pasal 6 pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
6. Pasal 23 Ayat (1) dalam menjalankan meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Ayat (2) dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.

Upaya pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara merupakan suatu upaya yang secara teknologi harus didahului dengan kemampuan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya ancaman dan perkembangannya. Berdasarkan kemungkinan terjadinya ancaman ini dirumuskan bagaimana cara menanggulanginya. Konsep deteksi dini ini sesuai dengan filosofi pertahanan di Indonesia yaitu *defence aktif* yang berarti bahwa Indonesia tidak akan menyerang negara lain kecuali bila kepentingannya digangu. Konsekuensi dari strategi *defence aktif* ini secara teknologi sangat sulit karena ada dua prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kemampuan untuk mendeteksi dini ancaman dan kekuatan Alutsista untuk penanggulangannya. Kedua hal inilah yang wajibkan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Alutsistanya. Penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan supaya berhasil secara optimal harus melibatkan Badan Penelitian, Pengguna



Sumber: Puskompublik Kemhan

the strength of its main weaponry system to prevent it. These two things require Indonesia to increase its capability in the main weaponry system. To bring the R&D of the defense industry and technology into success, it must involve the research body, user and the industry.

THE ROLE OF R&D OF MINISTRY OF DEFENCE

As mentioned in Law of the Republic of Indonesia No. 3/2002, to increase national defense, R&D in the defense industry and technology must be conducted. It is hoped that the Defense R&D Department as an institution under the Ministry of Defense is able to increase capability to support strong and integrated national defense autonomy.

The capability increase can begin when we have the confidence to produce our own main weaponry system, certainly by optimizing the existing resources. Every activity that supports the national defense should therefore be preceded by R&D.

That is where the R&D Department of the Ministry of Defense must optimize its human resources to conduct research. To realize autonomy in the national defense, the R&D Department of the Ministry of Defense must:

dan Industri.

PERAN BALITBANG KEMHAN

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 bahwa untuk meningkatkan pertahanan negara perlu dilakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan. Diharapkan Badan Litbang Pertahanan dalam hal ini Balitbang Kemhan yang merupakan institusi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan kemampuan dalam mendukung kemandirian pertahanan negara yang tangguh dan terintegrasi.

Peningkatan kemampuan dapat dimulai jika kita memiliki keyakinan membuat Alutsista sendiri tentunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Maka setiap kegiatan yang mendukung kemandirian pertahanan negara sebaiknya didahului dengan penelitian dan pengembangan.

Di sinilah Balitbang Kemhan harus dapat mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam melakukan kegiatan penelitian. Agar tercapainya kemandirian pertahanan negara tersebut maka Balitbang Kemhan perlu :

1. Pada tahap perancangan sampai proses pembuatan alat peralatan pertahanan, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama antara badan penelitian, pengguna (dalam hal ini TNI) dan industri. Pengguna harus dilibatkan mulai dari tahap awal. Libatkan pengguna sejak dari awal dimaksudkan supaya Alutsista yang dibuat mempunyai karakteristik sesuai dengan kebutuhan TNI. Kondisi ini bila tercapai maka hasilnya akan digunakan sebaliknya bila tidak melibatkan pengguna maka kemungkinan untuk digunakan relatif kecil, yang terjadi kemungkinannya adalah ditolak atau diadakan revisi-revisi sesuai dengan keinginan TNI. Proses perencanaan khususnya yang melibatkan



Sumber: Puskompublik Kemhan

1. The design and production process of the defense equipment should be better carried out by the research department, user (in this case the Ministry of Defense), and the industry. The user must be involved from the beginning, with the purpose that the main weaponry system has characteristics that meet with the need of the Indonesian Armed Forces. If achieved, the results will be used; on the contrary, if the user is not involved, there will only be a small possibility that the results will be used, or maybe even refused and revised to meet what the Indonesian Armed Forces have expected. The planning process which involves designing the main weaponry system is related to the function and image. The use includes technical calculations related to the power, while the image relates to the beauty and suitability with the nature. The image needs creativity, researchers must be given a space to create so that the equipment can be created as the user's wish and ergonomic to increase comfort in the use. Researchers are human beings who are different from machines. They therefore need freedom to produce defense equipment which is adjusted with the market condition. This

perancangan Alutsista berkaitan dengan fungsi guna dan fungsi citra. Fungsi guna meliputi perhitungan-perhitungan yang secara teknis berkaitan dengan kekuatan gaya-gaya yang terjadi, sedangkan fungsi citra lebih bersifat pada keindahan dan kesesuaian dengan alam. Fungsi citra ini memerlukan kreativitas yang tinggi, sebaiknya peneliti diberikan kebebasan dalam mencipta sehingga kreativitas akan muncul. Sehingga dapat menciptakan alat peralatan sesuai dengan keinginan *user* dan mempunyai sifat ergonomis yang dapat meningkatkan kenyamanan dalam pemakaiannya. Peneliti adalah manusia yang berbeda dengan mesin, oleh karena itu peneliti memerlukan kebebasan untuk membuat alat peralatan pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan pasar. Sehingga hasil Litbang yang ada semakin berkualitas, aplikatif, tepat guna dan memiliki daya jual. Kondisi idealnya Indonesia nantinya akan dapat juga mengekspor Alutsista hasil Litbang. Bila kondisi ini tercapai maka akan diperoleh suatu kondisi yang menyebabkan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi Alutsista yang sesuai dengan berjalannya waktu akan mempunyai kemampuan produksi dengan kuantitas besar dan kualitas yang tinggi. Prosesnya demikian :

- a. Ancaman terhadap NKRI akan menimbulkan terjadinya kebutuhan *standart* penanggulangan ancaman.
- b. *Standart* penanggulangan ancaman salah satunya berupa Alutsista, sehingga semakin tinggi Alutsista yang dibutuhkan maka akan meningkatkan kebutuhan



Sumber://www.kabardahlaniskan.com

way, results of the R&D will have higher quality, and be more applicative, efficient and marketable. Ideally, Indonesia can export the main weaponry system of the R&D in the future. Under such a condition, Indonesia will be able to increase its capability in the defense industry to produce the main weaponry system with large quantity and high quality. The process is as follows:

- a. Threat towards the Unitary State of the Republic of Indonesia will emerge a need of threat prevention standards.
- b. One of the threat prevention standards is the main weaponry system. The higher the need of the main weaponry system, the higher the need to develop the defense industry as required by the main weaponry system.
- c. Continuous improvement of the quality and quantity of the main weaponry system produced by the domestic defense industry will make it possible for the domestic main weaponry system to be exported

- pengembangan industri pertahanan sesuai dengan kebutuhan Alutsista tersebut.
- c. Pengembangan kualitas dan kuantitas Alutsista yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri bila berjalan secara terus-menerus maka kemungkinan produk Alutsista dalam negeri dapat dieksport adalah bukan suatu kemustahilan.
2. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan dan ilmu pengetahuan untuk pertahanan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa ilmu pengetahuan pertahanan berkembang lebih dahulu baru dipakai untuk kepentingan kesejahteraan. Di Indonesia kondisi menjadi sebaliknya yaitu alat peralatan untuk kesejahteraan dikembangkan untuk alat peralatan pertahanan. Kondisi ini menyebabkan bahwa Litbang pertahanan di Indonesia harus memanfaatkan hasil-hasil dari Litbang di luar Kemhan dan TNI seperti LAPAN, LIPI, BMKG, dan lain-lain untuk dapat dikembangkan menjadi Alutsista yang digunakan untuk pertahanan. Sebagai contoh adalah penelitian Roket untuk penelitian cuaca di LAPAN dimanfaatkan oleh Kemhan menjadi Roket pertahanan. Dilain pihak hasil dari Litbang harus bisa diproduksi maka harus pula menyiapkan industri-industri yang dapat mendukung produksi alat peralatan pertahanan.
- Sinergisitas antara badan Litbang di lingkungan Kemhan dan TNI, badan Litbang dan perguruan tinggi dan industri-industri pertahanan bila berjalan secara baik dapat diharapkan terjadinya optimalisasi one day.
2. In principle, science can be divided into science for welfare and science for defense. In developed countries such as the United States and European countries, science for defense first develops before it's used for welfare. In Indonesia, it is the contrary; equipment for welfare is developed to become equipment for defense. Such a condition causes the defense R&D in Indonesia to take advantage of results of the R&D outside the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, including LAPAN, LIPI, BMKG, etc so that the main weaponry system can be used for defense. For example, research on weather rocket at LAPAN is taken advantage by the Ministry of Defense for defense rocket. On the other hand, results of the R&D must be able to be produced. Industries must therefore be prepared to support production of the defense equipment. The synergy between the R&D Department at the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces, R&D departments and universities and defense industries, if run well, will optimize support of the R&D to development of the main weaponry system. Such a condition can be created



Sumber: Puskompublik Kemhan

dukungan Litbang terhadap pengembangan Alutsista. Jadi kondisi (optimalnya dukungan Litbang dalam pengembangan Alutsista di Indonesia) dapat diwujudkan dengan kerjasama antara *user* (Kemhan dan TNI), badan penelitian, perguruan tinggi dan industri yang bersinergi untuk modernisasi Alutsista sehingga Litbang selain berfungsi untuk mengembangkan Alutsista juga mensinergikan antara unsur-unsur terkait dengan perkembangan teknologi dan industri pertahanan.

3. Penelitian Litbang di Indonesia yang ada saat ini berdasarkan dari ilmu pengetahuan-ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan dan diaplikasikan untuk perkembangan teknologi industri pertahanan. Perkembangan teknologi dan industri pertahanan selalu seiring dan sejalan dengan konvensi senjata. Pada dasarnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan mengarah pada tiga hal yang penting yaitu jangkauan, daya ledak dan akurasinya. Berarti sebagaimana dengan perkembangan teknologi dan industri pertahanan serta konvensi senjata peran penelitian, personil peneliti dapat memperdalam tentang aturan-aturan (konvensi senjata) yang diperbolehkan maupun tidak dalam pemanfaatan Alutsista, sesuai dengan konvesi senjata yang antara lain menyatakan bahwa non combatan tidak boleh terkena serangan, maka pengembangan Alutsista harus meningkatkan keakuratannya. Jadi pada dunia modern dikembangkan secara terus-menerus peralatan yang memiliki akurasi tinggi sehingga hanya target combatan yang terkena.
4. Pelaksanaan Litbang yang menggunakan metodologi penelitian



Sumber: Puskompublik Kemhan

by cooperation between the user (the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces), research bodies, universities, and industries to modernize the main weaponry system so that apart from developing the main weaponry system, the R&D also synergizes related elements in the technology development and defense industry.

3. Current R&D in Indonesia is based on science for welfare which is applicable for technology development of the defense industry. Technology development and the defense industry are in line with the weapons convention. Basically, technology development and the defense industry lead to three important things, including reach, explosive power and accuracy. It means that as technology development and the defense industry as well as the weapons convention, the research and researchers can study more on the regulations which may or may not be used for the main weaponry system. Under the weapons convention, non-combatants may not be attacked, thus the main weaponry system must be accurate. In the modern world, equipment is continuously developed to have high accuracy so that only combatants are attacked.

yang benar akan memperluas dan memperdalam pengetahuan dari personil peneliti karena dalam proses penelitian ada proses penyempurnaan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu pengetahuan. Konsekuensi dari penyempurnaan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu pengetahuan ini pada pengembangan Alutsista TNI adalah meningkatkan jenis Alutsista yang diproduksi dan meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Alutsista inilah yang akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia sehingga bukan hanya MEF saja tetapi juga penanggulangan ancaman yang bersifat potensial.

HARAPAN KE DEPAN

Negara yang baik (ideal) adalah negara yang mampu memproduksi Alutsista dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi sehingga dapat menjual (mengekspor) Alutsistanya ke luar negeri. Kondisi ini memberikan keuntungan karena ancaman yang diperoleh NKRI akan meningkatkan kebutuhan penyediaan Alutsista TNI. Tahap selanjutnya peningkatan kebutuhan Alutsista TNI meningkatkan kebutuhan pengembangan industri pertahanan. Sehingga secara ringkas dapat dikatakan ancaman dapat meningkatkan kemampuan pertahanan negara juga kemampuan ekonomi nasional. Kondisi ini menyebabkan bahwa seluruh kegiatan untuk mendukung kemandirian pertahanan negara



Sumber: Puskompublik Kemhan

4. R&D that uses the correct research methodology will expand and deepen the researchers' knowledge because in the process, science must be enhanced and expanded. Consequently, it increases the types and quality of the main weaponry system produced. Increase on the quality and quantity of the main weaponry system will increase the capability of Indonesia's defense, so it's not just MEF but also potential threats prevention.

HOPES FOR THE FUTURE

An ideal country is one that is able to produce the main weaponry system with high quantity and quality so that it can sell (export) it abroad. Such a condition is advantageous as threat toward the Unitary State of the Republic of Indonesia will increase the need of the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces. The next phase is the increasing need to develop the defense industry. In brief, threats can increase the country's defense capability and national economy. Such a condition will cause all activities that support autonomy in the

harus didahului oleh Litbang pertahanan. Disinilah Balitbang Kemhan berperan penting untuk menjawab tantangan itu.

KESIMPULAN

1. Litbanghan harus mampu meningkatkan kualitas Alutsista TNI.
2. Di Indonesia pengembangan Alutsista TNI dilaksanakan dengan sinergi antara badan Litbang, pengguna dan industri.
3. Pengembangan Alutsista dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan industri yang telah dikuasai instansi-instansi lain di luar Kemhan dan TNI.
4. Litbang pertahanan diarahkan untuk menghasilkan Alutsista yang dapat memenuhi konvensi senjata yaitu tidak boleh mengenai sasaran non combatan.
5. Litbang pertahanan secara terus-menerus sesuai dengan siklus Litbang diarahkan untuk mampu memproduksi Alutsista dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi.***

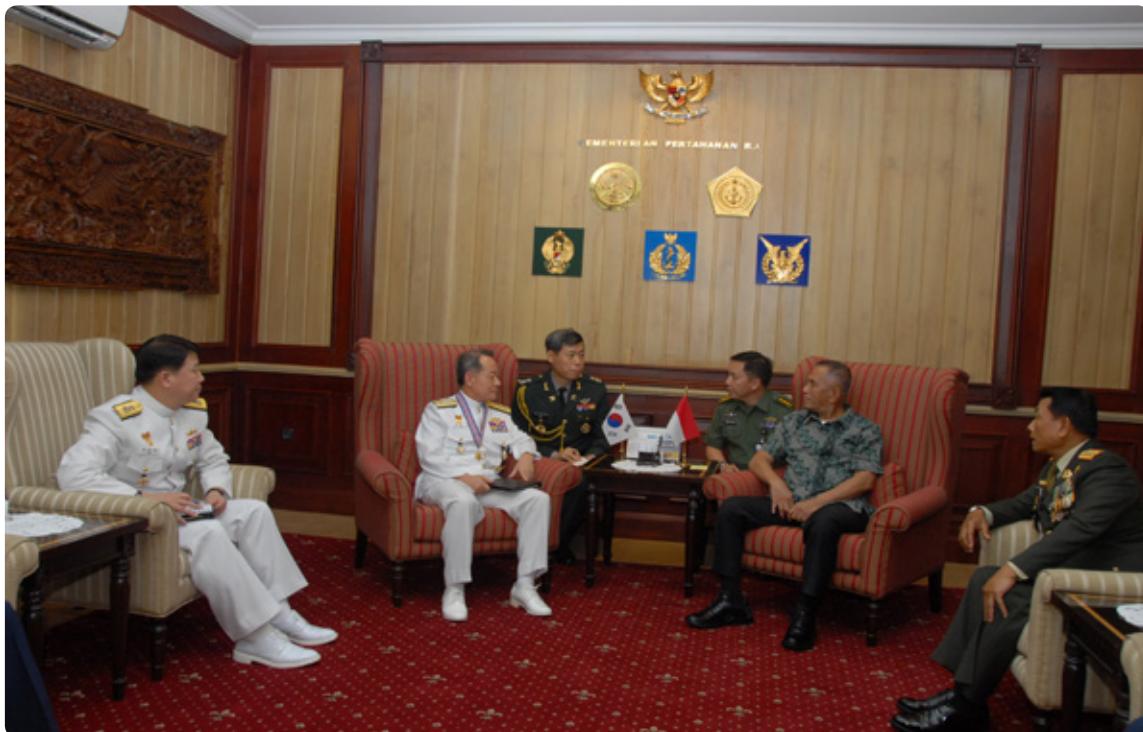
national defense, to be preceded by defense R&D. This is where the R&D department of the Ministry of Defense plays an important role to respond the challenge.

CONCLUSION

1. The defense R&D must be able to increase the quality of the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces.
2. In Indonesia, the main weaponry system of the Indonesian Armed Forces is developed within synergy between the R&D department, the user and the industry.
3. The main weaponry system is developed by taking advantage of the technology and industry which other institutions outside the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces already master.
4. The defense R&D leads to produce the main weaponry system that fulfills the weapons convention, that is not to attack non combatants.
5. The defense R&D continuously leads to produce the main weaponry system with high quantity and quality.***



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Dubes Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki.



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Chairman Korea Admiral Chair Yoom Hee.

BERITA FOTO



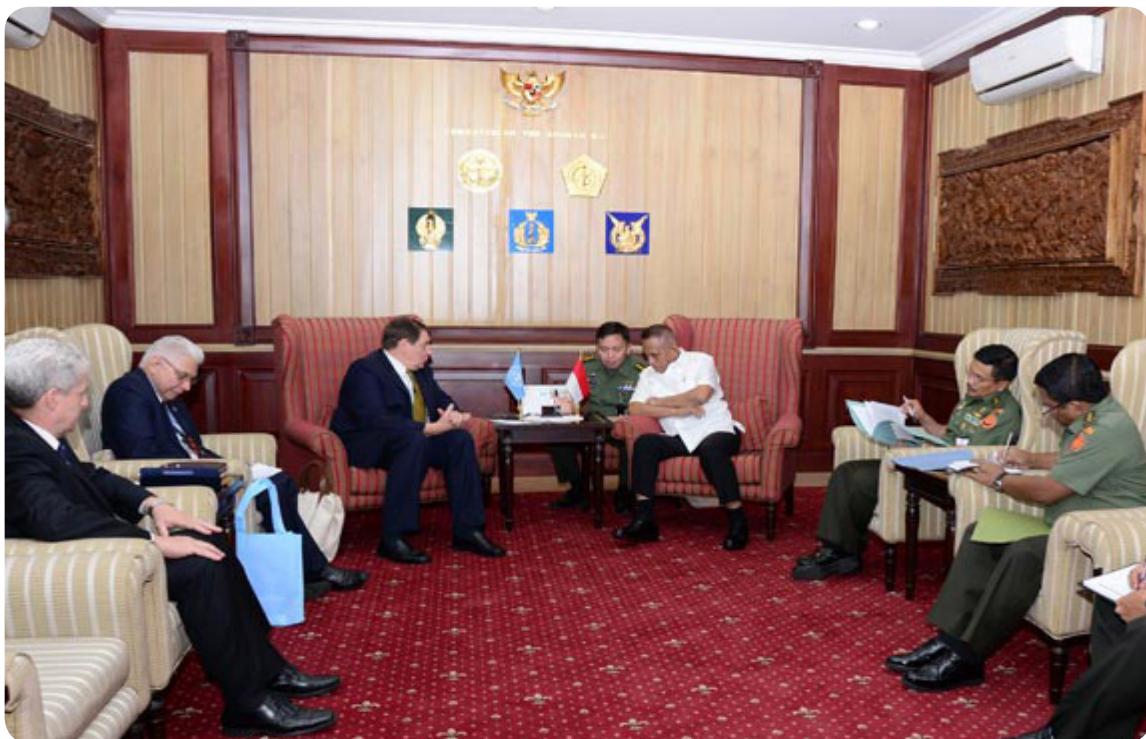
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kehormatan ke Singapura.



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Dubes Rusia untuk Indonesia M.Y.Galuzin.



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Republik Islam Pakistan di bidang pertahanan menjadi Undang-Undang (UU), di Jakarta.



Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Resident Coordinator of UN, Mr. Douglas Broderick

BERITA FOTO



Rakornis Ditjen Strahan Kemhan Tahun 2015



Rakernis Ditjen Renhan Kemhan Tahun 2015

BERITA FOTO



Rakornis Ditjen Kuathan Tahun 2015



Rakornis Bainstranas Kemhan Tahun 2015

BERITA FOTO



Kemhan Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Athan Negara Sahabat melalui Coffee Morning



Senior Executive of The Boeing Company Mr. Teong Tae Pak melakukan kunjungan kepada Menhan Ryamizard Ryacudu



Sekjen Kemhan membuka penataran pejabat perbendaharaan di lingkungan UO Kemhan demi peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan Kemhan.



Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemhan dan TNI Tahun 2014

BERITA FOTO



Peletakan Batu pertama pembangunan pos perbatasan wilayah RI-Malaysia oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kalimantan Barat



Menhan RI Ryamizard Ryacudu berkesempatan meninjau fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta



Menhan RI Ryamizard Ryacudu disambut Jajaran Kehormatan saat melaksanakan kunjungan ke Singapura



Presiden Jokowi saat meninjau garangan kapal dari PT PAL dan PT DPS, didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kasal Laksda TNI Ade Spandi. S.E, Dirut PT PAL Ir. Firmansyah Arifin, Direktur PT DPS Persero Riy Syerit Jatta serta para pejabat KKP dan Kemhan.